

## KATA PENGANTAR

Dalam upaya peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia agar mampu bersaing dalam era keterbukaan, pemerintah memandang perlu untuk menciptakan dan meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu kepada seluruh warga negara minimal pada jenjang Sekolah Menengah Pertama. Untuk mewujudkannya, Departemen Pendidikan Nasional mencanangkan Program Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bermutu tuntas pada tahun 2008/2009. Pencapaian target tersebut diperkuat oleh *Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara*, yang menginstruksikan kepada para Menteri terkait, Kepala BPS, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memberikan dukungan dan mensukseskan program pemerintah yang dimaksud.

Di samping itu, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah telah menetapkan *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar*. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut antara lain ditegaskan bahwa wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.

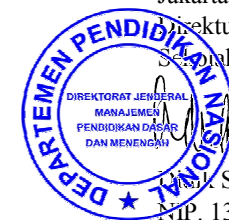
Untuk mencapai tujuan tersebut Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyusun berbagai kebijakan teknis dan strategi yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan atau kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi, baik yang terkait dengan substansi dan pengelolaannya di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun sekolah.

Kebijakan Teknis Direktorat Pembinaan SMP disesuaikan sebagai upaya untuk menentukan strategi, program dan kegiatan yang hendaknya dapat dipedomani sebagai acuan bagi pengambil kebijakan yang menjalani SMP baik di pusat, daerah di tingkat sekolah.

Jakarta, Januari 2009

Direktor Pembinaan

Sekolah Menengah Pertama,



Ummi Suhardi, SH., M.Si

NIP. 131 270 212

## BAB VII

### PENUTUP

Direktorat Pembinaan SMP mengambil kebijakan bahwa perluasan dan pemerataan kesempatan belajar harus dibarengi dengan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan serta *governance*, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Kesempatan belajar yang disediakan harus menjangkau semua anak usia 7 – 15 tahun, termasuk anak-anak yang berasal dari keluarga kurang beruntung, daerah terisolir, terpencil, daerah kumuh/pinggiran, dan anak-anak cacat/berkelainan/dengan kebutuhan khusus. Selain itu juga diupayakan agar ada kesetaraan *gender* dalam kesempatan pendidikan.

Ketercapaian tujuan dari berbagai program pembangunan pendidikan SMP tergantung pada seberapa baik program-program tersebut dilaksanakan. Salah satu kondisi yang harus dipenuhi agar pelaksanaan program berkualitas adanya pemahaman yang baik mengenai semua program, kesamaan pandangan, dan koordinasi dan kerjasama yang solid antara pengelola program di pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah pada setiap tahapan implementasi program. Untuk itu setiap pengelola perlu memahami pedoman/petunjuk/panduan pelaksanaan dari setiap program/kegiatan. Sosialisasi program, rapat koordinasi, penentuan sasaran, realisasi program, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan harus dilakukan dengan transparan dan penuh rasa tanggung jawab, tidak sekedar kegiatan terlaksanakan. Tekad untuk membangun pendidikan dengan lebih baik dari tahun ke tahun harus merupakan prinsip yang dipegang oleh setiap pengelola.

Seiring dengan semakin besarnya alokasi dana untuk bidang pendidikan di APBN, PEMDA harus secara bertahap meningkatkan anggaran untuk pendidikan. Dengan cara demikian program-program yang sementara ini didanai dengan APBN melalui alokasi dana dekonsentrasi atau subsidi langsung dari pusat, ketika dihentikan nanti dapat tetap terus berlanjut. Dengan demikian sustainability program dapat dipertahankan.

Semoga pembangunan pendidikan SMP memberikan kontribusi yang berarti kepada pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang pada gilirannya mampu membangun Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia.

## 2. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya:

- a. Penerapan sanksi kepegawaian (mutasi, penurunan pangkat, pemberhentian).
- b. Penerapan Proses hukum (proses peradilan, pengembalian uang dan hukuman badan).
- c. Pemblokiran dana untuk penyaluran berikutnya dan penghentian sementara untuk seluruh bantuan pada tahun berikutnya kepada kab/kota dan provinsi yang bersangkutan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Visi dan Misi Direktorat Pembinaan SMP .....	2
C. Tujuan .....	2
BAB II KONDISI PENDIDIKAN SMP SAAT INI .....	3
A. Pemerataan dan Perluasan Akses .....	3
B. Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan .....	5
C. Tantangan .....	25
BAB III KEBIJAKAN TEKNIS DAN STRATEGI .....	31
A. KEBIJAKAN .....	31
B. STRATEGI .....	34
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN .....	39
A. PROGRAM .....	39
B. KEGIATAN .....	41
BAB V KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PROGRAM 2009....	83
A. Tugas Pusat .....	83
B. Tugas Provinsi (Dinas Pendidikan Provinsi) .....	84
C. Tugas Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) .....	85
D. Tugas Sekolah .....	85
E. Koordinasi dan Sinkronisasi Program antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Sekolah .....	86
F. Peran Pemda dan Masyarakat dalam program pendidikan .....	86
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI .....	89
A. Supervisi Klinis .....	89
B. Pelaporan .....	92
C. Pengawasan dan Sanksi .....	93
BAB VII PENUTUP .....	95

- b. Laporan keuangan ini mengikuti standar keuangan yang sudah berlaku yang dilampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

### 3. Jenis Laporan

Laporan yang harus dibuat oleh Satker adalah laporan keuangan dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan. Jenis laporannya adalah sebagai berikut :

- a. Laporan hasil kegiatan
- b. Laporan Bulanan
- c. Laporan Tengah Tahunan
- d. Laporan Tahunan (LAKIP)

## C. Pengawasan dan Sanksi

### 1. Pengawasan

Dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program-program pada dana (dekonsentrasi) Provinsi, akan dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a. Pengawasan oleh Perguruan Tinggi.
- b. Unit Pengaduan Masyarakat. Unit ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan mendapatkan penyelesaian pengaduan secara cepat dan tepat atas terjadinya penyimpangan dan penyelewengan. Para murid, orang tua dan masyarakat umum dapat melaporkan segala bentuk hambatan dan penyimpangan terhadap pelaksanaan program-program pada kegiatan (dekonsentrasi) Provinsi maupun pelaksanaan program Direktorat Pembinaan SMP di Kabupaten/Kota kepada pengelola atau tim pemantau independen. Pengaduan dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan kepada:
  - 1) Komite Sekolah.
  - 2) Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dengan alamat di Kantor Dewan Pendidikan.
- c. Pengawasan oleh masyarakat: LSM, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain.
- d. Instansi/aparat pengawas seperti BPKP, BPK, Itjen dll

- 3) Kabupaten/kota dan sekolah mengimplementasikan program peningkatan mutu.
  - 4) Kabupaten/kota dan sekolah sedang mengimplementasikan program atau kegiatan peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan.
  - 5) Ada pengaduan tentang penyimpangan penggunaan dana dan atau proses/mechanisme pelaksanaan program/kegiatan.
- c. Monitoring oleh TTK dilakukan pada saat:
- 1) Provinsi sedang menyalurkan dana ke sekolah
  - 2) Persiapan dan pelaksanaan implementasi program di tingkat sekolah berjalan.
  - 3) Persiapan dan implementasi program peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan.
  - 4) Ada pengaduan tentang penyimpangan penggunaan dana dan atau proses/mechanisme pelaksanaan program/kegiatan.
- d. Monitoring oleh Komite Sekolah dilakukan pada saat:
- 1) Implementasi program di tingkat sekolah berjalan.
  - 2) Ada pengaduan tentang penyimpangan penggunaan dana dan atau proses/mechanisme pelaksanaan program/kegiatan.

## B. Pelaporan

Satker mempunyai kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban, baik pelaksanaan program maupun keuangan. Laporan akan dianalisis dan digunakan sebagai bahan untuk perencanaan program tahun berikutnya.

### 1. Laporan pelaksanaan program

Laporan pelaksanaan program terdiri atas: laporan kegiatan, laporan kemajuan, dan laporan akhir.

### 2. Laporan pertanggungjawaban keuangan

- a. Laporan keuangan harus dibuat oleh satuan kerja:
  - 1) Sebagai informasi tentang kondisi keuangan yang dikelola pada saat pelaporan untuk berbagai pihak yang memerlukan, terutama pemberi dana.
  - 2) Sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan nasional, mutu sumberdaya manusia merupakan salah satu modal dasar. Belajar dari pengalaman negara-negara industri baru (*new emerging industrialized countries*) di Asia Timur, pembangunan suatu bangsa memerlukan *critical mass*, yaitu sumberdaya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung pembangunan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu mengupayakan secara sungguh-sungguh agar sumberdaya manusia penduduk Indonesia memiliki tingkat pendidikan dan jenis keahlian tertentu untuk memenuhi *critical mass* yang dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, program pembangunan pendidikan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (Direktorat PSMP) sampai dengan akhir 2008 diprioritaskan pada penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) Sembilan Tahun, yang merupakan salah satu langkah strategis untuk membentuk *critical mass* tersebut. Sedangkan mulai tahun 2009 diarahkan untuk menyempurnakan program penuntasan wajib belajar tersebut secara merata di seluruh tanah air. Melalui program itu diharapkan terwujud masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan dasar yang esensial dan diharapkan dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau untuk menghadapi kehidupan di masyarakat.

Sejak 1 Januari 2003 Indonesia telah memasuki era AFTA dan AFLA serta akan memasuki era APEC pada tahun 2010. Dalam era keterbukaan itu, bangsa Indonesia harus siap berkompetisi dengan bangsa lain dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga penyiapan sumberdaya manusia yang bermutu merupakan hal yang amat penting dan mutlak harus dilaksanakan.

Pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ditujukan bagi anak-anak usia 7-15 tahun, termasuk juga anak-anak dari keluarga kurang beruntung, terpencil, dari daerah (pasca) konflik, daerah pasca bencana, dan anak-anak penyandang cacat, serta dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Pada akhir tahun 2008 telah tercapai Angka Partisipasi Kasar (APK) secara nasional 96.18% atau tuntas paripurna. Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mulai bergeser ke arah penuntasan daerah-daerah (provinsi, kabupaten dan kota) yang belum mencapai tuntas paripurna, lebih memfokuskan pada peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan

di Indonesia bukan semata-mata untuk mencapai angka partisipasi dalam pendidikan, tetapi lebih jauh dari itu yaitu untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Demikian juga dalam pembinaan pendidikan pada jenjang SMP/Sederajat bukan sekedar mengejar tingginya angka partisipasi dalam memperoleh layanan pendidikan dasar, tetapi harus lebih ditingkatkan ke arah pendidikan dasar yang bermutu.

Dengan bekal kemampuan dasar yang bermutu, lulusan pendidikan dasar selain mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi diharapkan juga lebih mampu memilih bidang pekerjaan yang sesuai dengan potensi dirinya, melakukan interaksi dengan masyarakat maupun lingkungan kehidupannya, dan mengatasi masalah kehidupan sehari-hari serta bersaing dalam percaturan global sesuai dengan kemampuannya.

## B. Visi dan Misi Direktorat Pembinaan SMP

### Visi Direktorat Pembinaan SMP

Visi Direktorat Pembinaan SMP adalah ‘Tercapainya layanan Pendidikan SMP yang Bermutu dalam rangka Wajib Belajar 9 Tahun’.

### Misi Direktorat Pembinaan SMP:

Misi Direktorat Pembinaan SMP adalah ‘penyelenggaraan SMP yang memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan kepada anak usia SMP untuk memperoleh pendidikan yang bermutu’.

## C. Tujuan

Buku Kebijakan Direktorat Pembinaan SMP tahun 2009 ini disusun dengan tujuan :

1. Sebagai panduan bagi Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Mandikdasmen Depdiknas dalam implementasi program-program tahun 2009.
2. Untuk memberikan informasi kepada instansi terkait seperti Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan tentang kebijakan-kebijakan Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Mandikdasmen Depdiknas dalam rangka pembinaan SMP yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2009.
3. Untuk memandu langkah-langkah instansi terkait seperti Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan tentang program dan kegiatan pembinaan SMP yang akan dilaksanakan pada tahun 2009.

- 1) Implementasi program atau kegiatan yang berkaitan dengan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan (Akses) di lokasi sasaran.
- 2) Implementasi program atau kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan di sekolah.
- 3) Implementasi program atau kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan governance, akuntabilitas, dan pencitraan publik pendidikan di lokasi sasaran.
- 4) Transparansi pelaksanaan program di lokasi sasaran.
- 5) Pengaduan atas penyimpangan dana di sekolah.
- 6) Monitoring kasus penyalahgunaan dana di tingkat sekolah.

## 4. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sangat bergantung kepada kapan rangkaian implementasi kegiatan dimulai. Oleh karena sasaran program ini adalah seluruh provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah sasaran, maka sering kali sulit untuk menetapkan secara tepat kapan waktu monitoring harus dilakukan. Namun demikian waktu pelaksanaan monitoring dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Monitoring oleh Tim Pusat dilakukan pada saat:
  - 1) Provinsi melakukan sosialisasi program ke kabupaten/kota dan ke sekolah.
  - 2) Implementasi program perluasan kesempatan memperoleh pendidikan (program akses) baik di provinsi, kabupaten/kota, atau di sekolah.
  - 3) Implementasi program peningkatan mutu baik di provinsi, kabupaten/kota, atau di sekolah.
  - 4) Implementasi program peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan baik di provinsi, kabupaten/kota, atau di sekolah.
  - 5) Ada pengaduan tentang penyimpangan penggunaan dana dan atau proses/mekanisme pelaksanaan program/kegiatan.
- b. Monitoring oleh Tim Provinsi dilakukan pada saat:
  - 1) Kabupaten/kota melakukan sosialisasi ke tingkat sekolah.
  - 2) Kabupaten/kota dan sekolah mengimplementasikan program perluasan kesempatan memperoleh pendidikan (program akses).

- 2) Implementasi program atau kegiatan yang berkaitan dengan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan (Akses) di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah.
- 3) Implementasi program atau kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah.
- 4) Implementasi program atau kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan governance, akuntabilitas, dan pencitraan publik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah.
- 5) Transparansi pelaksanaan program di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah.
- 6) Pengaduan atas penyimpangan dana di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah.

#### b. Tim Provinsi

Monitoring di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Tim Provinsi yang telah dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Hal-hal yang perlu dimonitor dan dievaluasi oleh Tim Provinsi adalah:

- 1) Sosialisasi di tingkat kabupaten.
- 2) Implementasi program atau kegiatan yang berkaitan dengan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan (Akses) di kabupaten/kota dan sekolah.
- 3) Implementasi program atau kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah.
- 4) Implementasi program atau kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan governance, akuntabilitas, dan pencitraan publik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah.
- 5) Transparansi pelaksanaan program di kabupaten/kota, dan sekolah.
- 6) Pengaduan atas penyimpangan dana di kabupaten/kota, dan sekolah.

#### c. Tim Kabupaten/Kota

Monitoring di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh TTK yang telah dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Hal-hal yang perlu dimonitor oleh TTK adalah:

## BAB II

### KONDISI PENDIDIKAN SMP SAAT INI

Pembangunan pendidikan dasar yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan berbagai upaya telah menunjukkan hasil yang cukup berarti meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu memperoleh perhatian. Pencapaian pembangunan pendidikan itu dapat dilihat dari berbagai indikator yang menggambarkan kondisi pendidikan SMP pada saat ini, antara lain pada Pemerataan dan Perluasan Akses untuk memperoleh kesempatan belajar dan mutu pendidikan.

Pencapaian pemerataan dan perluasan kesempatan belajar dapat dilihat dari indikator: (1) angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni; (2) angka putus sekolah, dan (3) angka melanjutkan. Sedangkan mutu pendidikan dapat diketahui melalui indikator: (1) Nilai hasil Ujian Nasional, (2) angka kelulusan, (3) angka mengulang kelas, (4) angka penyelesaian, (5) rasio antara siswa dengan guru; (6) rasio antara siswa dengan kelas; (7) rasio antara rombongan belajar dengan ruang kelas; (8) rasio antara laboratorium dengan sekolah; (9) tingkat kelayakan mengajar guru; dan (10) kondisi gedung sekolah. Berikut gambaran pencapaian pada masing-masing komponen.

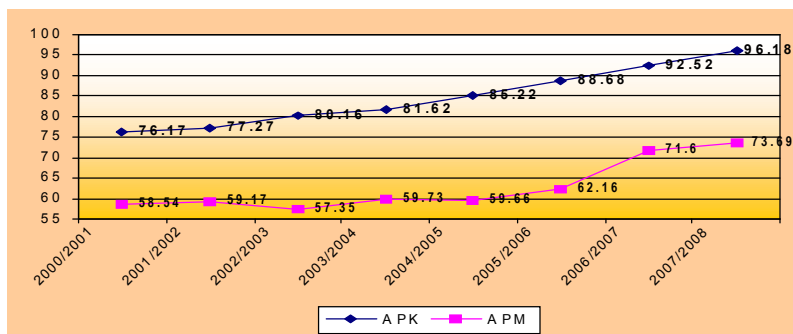
#### A. Pemerataan dan Perluasan Akses

##### 1. Angka Partisipasi SMP

Berdasarkan data yang ada pada Pusat Statistik Pendidikan Depdiknas, pada tahun 2007/2008 terdapat 13.024.300 orang anak umur 13-15 tahun, 12.527.025 orang atau 96,18% memperoleh akses pendidikan ke SMP/MTs/ sederajat. Sebagai indikator akses maka digunakan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK merupakan penghitungan yang belum secara spesifik memisahkan anak usia 13-15 tahun saja, karena sebagian siswa SMP/MTs/ sederajat adalah mereka yang masih berusia 12 tahun dan bahkan berusia lebih dari 15 tahun.

Untuk memperhalus penghitungan di atas, maka juga digunakan angka partisipasi murni (APM), yaitu hanya menghitung siswa SMP/MTs/ sederajat yang berusia 13 – 15 tahun. Angka Partisipasi Kasar dan Angka

Partisipasi Murni untuk SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2008 seperti yang tertuang pada grafik berikut.



Grafik 2.1 Perkembangan APK dan AMP SMP/Sederajat Tahun 2000/2001 – 2007/2008

Dengan APK 96.18% pada tahun 2008 di atas, maka masih terdapat 497.275 anak usia 13-15 tahun di seluruh Indonesia yang belum memperoleh pendidikan SMP/MTs/ sederajat. Di samping itu, dengan APM sebesar 73.69% atau jumlah siswa SMP/MTs/ Sederajat usia 13 – 15 tahun, maka dapat diketahui bahwa terdapat 22.49% atau sebanyak 2.928.887 anak SMP/MTs/ Sederajat yang berusia di bawah dan/atau di atas 13 – 15 tahun.

Apabila dikaitkan dengan persebaran anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah, mereka berada di kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia terutama kabupaten yang belum tuntas. Tingkat ketuntasan provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia tahun 2004 s.d. 2008 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Tingkat Ketuntasan APK Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2004 s.d. 2008

NO	TINGKAT KETUNTASAN	KISARAN APK	KABUPATEN/KOTA					PROVINSI				
			2004	2005	2006	2007	2008	2004	2005	2006	2007	2008
1	Paripurna	APK $\geq$ 95	76	115	143	187	252	2	2	7	11	17
2	Utama	90<APK $\leq$ 95	51	53	54	56	56	2	6	6	4	6
3	Madya	85<APK $\leq$ 90	48	48	52	48	41	6	7	5	7	4
4	Pratama	80<APK $\leq$ 85	42	44	35	38	36	6	4	4	4	3
5	Belum Tuntas	APK $\leq$ 80	216	180	156	111	76	17	14	11	7	3
Jumlah			433	440	440	440	461	33	33	33	33	33

Tiga provinsi yang APK-nya belum tuntas (< 80%) adalah Nusa Tenggara Timur (77.65%), Papua (79.05%), dan Papua Barat (77.70). Sementara itu, apabila dilihat

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### A. Supervisi Klinis

#### 1. Tujuan

Pelaksanaan supervisi klinis bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan berbagai program dan kegiatan telah tepat sasaran, sesuai dengan yang diprogramkan, serta dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

#### 2. Sasaran

Sasaran supervisi klinis adalah kegiatan pelaksanaan program atau kegiatan yang didanai oleh dan dekonsentrasi di provinsi, kabupaten, dan sekolah. Adapun aspek-aspek yang akan dimonitor mencakup:

- Kegiatan sosialisasi di provinsi dan kabupaten/kota.
- Implementasi program atau kegiatan yang berkaitan dengan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan (Akses).
- Implementasi program atau kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.
- Implementasi program atau kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan.
- Transparansi pelaksanaan program di semua tingkat.
- Pengaduan atas penyimpangan dana di semua tingkat.

#### 3. Pelaksana

Pelaksana supervisi klinis adalah Tim Pusat, Tim Provinsi, TTK dan Tim Sekolah.

##### a. Tim Pusat

Tim monitoring tingkat pusat adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Pembinaan SMP dan bertugas melakukan monitoring terhadap aktivitas sebagai berikut:

- Sosialisasi program dan kegiatan di tingkat provinsi, kabupaten, dan sekolah.

3. Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.
4. Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
5. Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut biaya dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah.
6. Sekolah swasta wajib menggratiskan peserta didik yang kurang mampu agar dapat bersekolah.

#### Tanggung Jawab Masyarakat/Orang tua peserta didik

1. Menyediakan biaya pribadi peserta didik, misalnya uang saku/uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis, dll.
2. Menyediakan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasional pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
3. Masyarakat diperbolehkan menyumbang dana pendidikan kepada sekolah secara sukarela tanpa paksaan, dan tanpa ditentukan besar sumbangannya.
4. Masyarakat diminta partisipasinya untuk ikut mengawasi pelaksanaan pendidikan gratis ini, diluar penggunaan dana yang dikelola sekolah.

dari jumlah kabupaten terbanyak yang belum tuntas di adalah Nusa Tenggara Timur (15 kabupaten), Papua (13 kabupaten) dan Kalimantan Barat (10 kabupaten).

Masih terdapat anak usia 13-15 tahun yang belum bersekolah. Diduga disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (1) mereka tinggal di daerah terpencil, terpencar dan terisolir, tidak ada SMP/MTs/ sederajat yang sulit dijangkau, (2) mereka tidak bersekolah karena alasan ekonomi, (3) mereka tinggal di lingkungan masyarakat yang secara budaya belum menganggap pendidikan sebagai sesuatu yang penting, (4) mereka bekerja mencari nafkah untuk membantu orang tua, atau (5) mereka tinggal di daerah rawan konflik.

Di samping alasan-alasan di atas, juga ditemui bahwa kabupaten-kabupaten yang APKnya rendah, tingkat pendidikan orang tua di kabupaten itu juga rendah serta tingkat perekonomiannya juga rendah.

Mengingat penyebabnya yang beragam, diperlukan usaha yang serius untuk memecahkan masalah sesuai dengan penyebab di atas, salah satu upayanya adalah menambah daya tampung seperti membangun Ruang Kelas Baru (RKB), mengembangkan SD-SMP Satu Atap, mendirikan Unit Sekolah Baru (USB), memberikan advokasi tentang pentingnya pendidikan bagi kehidupan dan menyediakan beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu.

## B. Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan

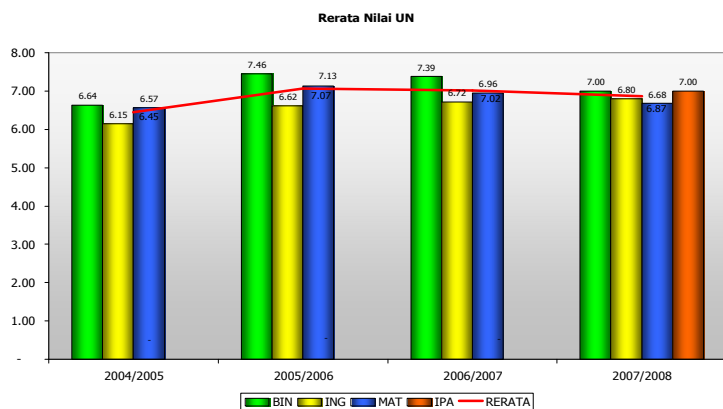
### 1. Nilai Ujian Nasional SMP

Berdasarkan data hasil UN dari Puspendik, disusun tabulasi mengenai perbandingan rerata nilai UN dan persentase kelulusan peserta didik SMP sejak tahun 2004/2005 sampai dengan 2007/2008 seperti terlihat pada tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 2.2 : Rerata Nilai UN Secara Nasional**

No	Tahun Ajaran	Rerata Nilai UN				
		BIN	ING	MAT	IPA	Rerata
1.	2004/2005	6,64	6,15	6,57	-	6,45
2.	2005/2006	7,46	6,62	7,13	-	7,07
3.	2006/2007	7,39	6,72	6,96	-	7,02
4.	2007/2008	7,00	6,80	6,68	7,00	6,87

Untuk memperjelas gambaran pertumbuhan kondisi mutu SMP, berikut ini merupakan grafik pertumbuhan kondisi mutu SMP dari tahun 2004/2005 sampai dengan 2007/2008.



**Grafik 2.2 Rerata nilai UN dari Tahun 2004/2005 sampai dengan 2007/2008**

Berdasarkan Tabel 2.2 dan Grafik 2.2 di atas terlihat bahwa rerata UN 2005/2006 mengalami peningkatan 0,62, dari 6,45 pada tahun 2004/2005 menjadi 7,07. Namun demikian, rerata UN ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2006/2007 sebesar 0,05. Demikian juga pada tahun ajaran 2007/2008 nilai rerata UN juga mengalami penurunan sebesar 0,15. Penurunan rerata UN secara nasional terutama pada tahun 2007/2008 perlu mendapat perhatian yang serius, baik dari Direktorat Pembinaan SMP maupun seluruh Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kab/Kota.

Rerata nilai UN secara nasional dapat menggambarkan kondisi mutu secara umum. Akan tetapi angka ini tidak dapat digunakan untuk pembinaan ke sekolah, sesuai dengan tingkatan mutu yang dicapainya. Oleh karena itu dilakukan pengolahan rerata nilai UN untuk melihat pengelompokan sekolah sesuai dengan level yang telah ditentukan. Tabel berikut menyajikan kategori sekolah berdasarkan indikator pencapaian nilai rerata Ujian Nasional lima tahun terakhir, yang dikategorikan sebagai A (sangat baik), B (baik), C (cukup), D (kurang), dan E (sangat kurang).

2. Investasi pada lahan, sarana dan prasarana selain lahan pendidikan pada satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
3. Bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya operasional satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah sampai terpenuhinya standar nasional pendidikan.
4. Sekolah yang diselenggarakan pemerintah/pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional dan/atau berkeunggulan lokal, selain dari pemerintah dan pemerintah daerah, pendanaan tambahan dapat juga bersumber dari masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau sumber lain yang sah.
5. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya non personalia yang diselenggarakan oleh masyarakat.

#### **Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**

1. Pemerintah daerah mengendalikan biaya-biaya lain yang diminta oleh sekolah atau biaya personal yang memberatkan siswa, seperti seragam, LKS, sepatu dan lain-lain.
2. Pemerintah daerah wajib memantau besarnya biaya sekolah swasta yang dibebankan kepada orang tua/wali peserta didik agar tidak terlalu memberatkan.
3. Biaya dari pemerintah dalam menyediakan biaya operasional sekolah hanya merupakan stimulan. Pemerintah daerah wajib menutupi kekurangan biaya lainnya sampai terpenuhinya standar nasional pendidikan.

#### **Tanggung Jawab Sekolah**

1. Semua SMP Negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
2. Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasional yang telah dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal wajib menerima dana BOS.

sebagian besar implementasi berbagai program Direktorat Pembinaan SMP adalah di sekolah (SMP). Tugas sekolah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, khususnya dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota berkaitan dengan berbagai program dari Direktorat Pembinaan SMP Jakarta.
2. Melaksanakan program yang diperolehnya secara sungguh-sungguh, konsekuen, dan komitmen yang tinggi sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan program yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMP Jakarta.
3. Melakukan konsultasi pelaksanaan program yang diperolehnya dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota.

#### E. Koordinasi dan Sinkronisasi Program antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Sekolah

Koordinasi dan sinkronisasi implementasi program antara pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah dilaksanakan melalui berbagai cara sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan tindak lanjut program. Koordinasi dan sinkronisasi yang utama dilaksanakan melalui kegiatan rapat koordinasi pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, sosialisasi program kepada seluruh sasaran (sekolah) baik secara langsung maupun melalui media cetak maupun elektronik, workshop penyusunan action plan pelaksanaan program, dan pelaporan pelaksanaan baik di tengah (kemajuan) maupun akhir program.

Diharapkan dari kegiatan sinkronisasi ini seluruh kegiatan prioritas dalam rangka pembinaan SMP dapat dilakukan secara sinergi antara pusat, provinsi, kabupaten/kota dan sekolah.

#### F. Peran Pemda dan Masyarakat dalam program pendidikan

Keberhasilan program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu tidak hanya merupakan tugas dan wewenang pemerintah pusat saja, tetapi juga merupakan kewajiban dan wewenang pemerintah daerah, sesuai dengan PP No. 47 tahun 2008 dan PP No. 48 Tahun 2008. Di kedua peraturan pemerintah itu telah diatur kewajiban dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah serta hak dan kewajiban masyarakat, sebagai berikut :

##### Tanggung Jawab Pemerintah dan pemerintah daerah

1. Menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

**Tabel 2.3: Perkembangan jumlah SMP berdasarkan kategori dengan indikator rerata nilai Ujian Nasional SMP Negeri dan Swasta tahun 2003/2004 - 2007/2008**

No.	Kategori	Tahun Pelajaran									
		2003/2004		2004/2005		2005/2006		2006/2007		2007/2008	
1	A (sangat baik)	182	0,88%	2.042	9,32%	5.098	22,7%	5.240	22,6%	4.687	19,3%
2	B (baik)	1.473	7,12%	6.401	29,23%	9.478	42,2%	9.778	42,1%	9.829	40,5%
3	C (cukup)	7.595	36,70%	8.754	39,97%	6.332	28,2%	6.197	26,7%	7.104	29,2%
4	D (kurang)	10.653	51,48%	4.028	18,39%	1.362	6,1%	1.733	7,5%	2.054	8,5%
5	E (sangat kurang)	792	3,83%	675	3,08%	183	0,8%	254	1,1%	619	2,5%
Jumlah		20.695	100%	21.900	100%	22.453	100%	23.202	100%	24.293	100%

##### Keterangan:

- Sangat Baik (A) : Jumlah nilai UN  $\geq 22,5$  atau Rerata UN  $\geq 7,5$ .  
 Baik (B) : Jumlah nilai UN antara 22,49 s.d 19,5 atau Rerata UN 7,49 s.d 6,5.  
 Cukup (C) : Jumlah nilai UN antara 19,45 s.d 16,5 atau Rerata UN 6,49 s.d 5,5.  
 Kurang (D) : Jumlah nilai UN antara 16,49 s.d 13,5 atau Rerata UN 5,49 s.d 4,5.  
 Sangat Kurang (E) : Jumlah nilai UN  $\leq 13,49$  atau Rerata UN  $\leq 4,49$ .

Berdasarkan tabel 8 di atas terlihat bahwa jumlah sekolah yang masuk kategori Sangat Baik mulai dari tahun 2004/2005 sampai dengan 2006/2007 cenderung naik secara berarti. Demikian pula jumlah sekolah kategori Baik juga cenderung naik. Dari kondisi tersebut dapat ditegaskan bahwa mulai tahun 2004/2005 sampai dengan 2006/2007, upaya peningkatan mutu sekolah telah berhasil dengan baik.

Jumlah sekolah kategori “cukup” pada tahun 2004/2005 sampai dengan 2006/2007 cenderung turun. Hal ini disebabkan adanya cukup banyak sekolah yang pada awalnya berkategori “cukup” mengalami kenaikan kategori menjadi “baik”, dan bahkan “sangat baik”. Hal ini merupakan indikasi keberhasilan program peningkatan mutu pada periode tersebut.

Pada tahun ajaran 2004/2005 sampai 2005/2006, jumlah sekolah kategori “kurang” dan “sangat kurang” mengalami penurunan yang berarti. Hal ini juga merupakan indikasi keberhasilan program peningkatan mutu pada periode tersebut. Namun demikian, pada tahun 2006/2007 dan 2007/2008 terjadi peningkatan jumlah sekolah berkategori “kurang” dan “sangat kurang”. Sebaliknya, terjadi penurunan jumlah sekolah kategori Sangat Baik. Ini berarti terdapat sejumlah sekolah yang mengalami penurunan kategori atau terjadi penurunan mutu sekolah.

Di samping fluktuasi hasil ujian nasional maupun jumlah kelompok sekolah kategori ‘sangat kurang’ dan ‘kurang’ yang sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2007 dan 2008 setelah turun pada tahun-tahun sebelumnya, ujian nasional memang masih menyimpan permasalahan-permasalahan yang perlu ditangani secara lebih serius. Diantara permasalahan yang muncul misalnya: kenekatan oknum guru di kabupaten Bengkalis, Riau yang disuruh membagikan lembar jawaban ujian kepada para siswa<sup>1</sup>. Kasus lain yang dialami anak misalnya siswa SMP di Semarang meninggal setelah selesai mengikuti ujian nasional lantaran stress tidak mampu mengerjakan salah satu pelajaran. Kondisi yang demikian, nampaknya juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan membuat kunci jawaban palsu untuk meraup keuntungan dan sekaligus menodai pelaksanaan ujian nasional<sup>2</sup>.

Beberapa permasalahan di atas, pada dasarnya merupakan ambisi kelulusan yang sangat tinggi yang tidak disertai dengan nilai-nilai kejujuran dari semua jajaran yang terlibat dalam penyelenggaraan ujian nasional. Akibatnya, pemerintah menjadi kambing hitam untuk disalahkan.

Dengan dasar pengalaman sejarah yang telah berlangsung, dan setelah mempelajari sistem penyelenggaraan pendidikan di beberapa negara, akhirnya Soedijarto<sup>3</sup> berkesimpulan bahwa ujian nasional itu hanya dapat digunakan untuk: 1) memperoleh peta mutu hasil belajar pada (tiga) matapelajaran yang diujikan sebagai dasar untuk melakukan serangkaian perbaikan dan pembaharuan, 2) untuk menentukan lulusan SMP yang dapat melanjutkan pendidikan ke SMA.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas penanganan ujian nasional masih perlu ditingkatkan secara lebih profesional dengan menyentuh aspek-aspek yang berkaitan dengan kualitas guru dan manajemen penyelenggaraan ujian nasional. Dengan penanganan ujian nasional yang lebih

7. Mensinkronkan program dan kegiatan Satker dengan program dan kegiatan yang dibiayai melalui anggaran provinsi (APBD-I) dan anggaran Kabupaten/Kota (APBD-II).

### C. Tugas Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota)

1. Membentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota (TTK) sebagai unit yang membantu mensupervisi dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan Direktorat Pembinaan SMP di Kabupaten/Kota yang diluncurkan langsung oleh pusat maupun melalui provinsi (dekonsentrasi).
2. Memberikan arahan/pedoman kerja serta mensinkronkan agar pelaksanaan program dan kegiatan Satker berjalan sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap kinerja Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam mensupervisi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Kabupaten/Kota melalui Kebijakan Direktorat Pembinaan SMP.
4. Menindaklanjuti penyimpangan penggunaan dana yang tidak dapat diselesaikan oleh Sekolah dan TTK.

#### Selanjutnya secara khusus TTK memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan supervisi dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan SMP di sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui dana (Dekonsentrasi) Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Pembinaan SMP.
2. Melaksanakan program kegiatan Direktorat Pembinaan SMP dan kegiatan (dekonsentrasi) sesuai dengan buku “Pedoman Pelaksanaan Tim Teknis Kabupaten/Kota” yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMP.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan SMP baik yang berasal dari dana (Dekonsentrasi) Provinsi maupun dari Direktorat Pembinaan SMP.
4. Menyusun laporan tentang pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan SMP baik yang berasal dari dana (Dekonsentrasi) Provinsi maupun dari Direktorat Pembinaan SMP, serta mengirimkan laporan tersebut ke Provinsi atau Direktorat Pembinaan SMP.

### D. Tugas Sekolah

Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan sasaran utama dari berbagai program yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan SMP. Oleh karena itu

<sup>1</sup> detikcom 22 April 2008

<sup>2</sup> Pelita, 14 Januari 2009

<sup>3</sup> Soedijarto, 2008. Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita. Jakarta, Kompas, pp. 153 – 155.

## B. Tugas Provinsi (Dinas Pendidikan Provinsi)

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan arahan/pedoman kerja agar pelaksanaan program dan kegiatan di Provinsi berjalan sesuai dengan kebijakan Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Memfasilitasi agar Provinsi dapat bekerja secara optimal.
3. Melakukan supervisi, pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan program serta kegiatan Satker.
4. Menindaklanjuti penyimpangan terhadap pengelolaan program dan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan oleh Kabupaten/Kota.

Sebagai penanggungjawab program dan kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi, Kasubdin yang menangani SMP mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang terkait dengan SMP.
2. Menyampaikan pokok-pokok isi petunjuk khusus yang terdapat pada petunjuk operasional pelaksanaan program baik secara lisan maupun tertulis kepada pengelola Satker.
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Satker/bagian Satker secara berkala dan melaporkan berbagai permasalahan yang dihadapi kepada kepala Dinas Pendidikan.
4. Melaksanakan pengawasan melekat terhadap seluruh pengelola Satker yang menangani SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat dan Direktorat Pembinaan SMP.
5. Memberikan bimbingan teknis kepada pengelola Satker agar memahami, melaksanakan hubungan kerja dan bersinergi dengan program dan kegiatan rutin.
6. Mensinkronkan program dan kegiatan Satker dengan program dan kegiatan rutin dalam kerangka pembangunan pendidikan SMP melalui Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

profesional di atas, diharapkan beberapa kritik dan kekhawatiran masyarakat dan pengamat pendidikan dapat diminimalisir.

Selain berdasarkan pemetaan nilai Ujian Nasional, upaya untuk melihat peningkatan mutu pendidikan adalah dengan memperhatikan perkembangan sekolah RSBI (Rintisan SMP Bertaraf Internasional) dan SSN (Sekolah Standar Nasional) yang telah dibina oleh Direktorat Pembinaan SMP. Hingga tahun 2009, Direktorat Pembinaan SMP telah membina 300 RSBI dan 1.858 SSN. SMP lain diluar SMP RSBI yang dibina oleh Direktorat Pembinaan SMP, terdapat 50 sekolah yang secara mandiri berkategori SBI. Apabila dilihat dari perolehan nilai Ujian Nasional tahun 2007/2008, terdapat 9.998 sekolah yang bisa dikategorikan SSN, yaitu sekolah-sekolah yang mencapai nilai UN 2007/2008  $\geq 6.75$ . Dengan demikian jumlah sekolah SSN saat ini baik yang telah dibina Direktorat maupun yang berdasarkan capaian UN masuk kategori SSN berjumlah 11.856 sekolah. Dengan asumsi bahwa jumlah SMP seluruh Indonesia saat ini berjumlah 24.643 sekolah, maka terdapat 12.437 sekolah yang masuk dalam kategori sekolah potensial/standar pelayanan minimal (SP/SPM). Untuk lebih jelas melihat jumlah SMP berdasarkan pengkategorian ini, tabel berikut memaparkan data yang dimaksud.

**Tabel 2.4. Rekapitulasi Total SMP Berdasarkan Kategori hingga Tahun 2009**

No	Kategori	Jumlah SMP		
		Dibina Direktorat	Mandiri/Berdasarkan Nilai UN 07/08	Jumlah
1.	Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)	-	50	50
2.	Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI **)	300	-	300
3.	Sekolah Standar Nasional (SSN)	1.858	9.998	11.856
4.	Sekolah Potensial/Standar Pelayanan Minimal *)	-	12.437	12.437
Total SMP ***)				24.643

Keterangan :

\*) : Diantara jumlah tersebut masih dimungkinkan terdapat kelompok sekolah SSN, RSBI atau SBI (belum diverifikasi)

- \*\*\*) : Sampai tahun 2008 pemerintah belum menetapkan SBI pada jenjang SMP.  
 \*\*\*) : Jumlah SMP bisa bertambah sesuai dengan penambahan SMP Satu Atap atau USB.

## 2. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang (kelas/tingkat) terakhir. Di tingkat nasional angka kelulusan pada tahun 2007/2008 untuk SMP sebesar 92,83%. Perkembangan kelulusan peserta UN dari tahun 2004/2005 s.d. 2007/2008 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5. : Persentase Kelulusan Peserta UN Secara Nasional**

No	Tahun Ajaran	Peserta UN	Kelulusan Peserta	
			Jumlah	(%)
1.	2004/2005	2,363,816	2,057,123	87,03
2.	2005/2006	2,387,807	2,205,303	92,36
3.	2006/2007	2,485,766	2,332,728	93,84
4.	2007/2008	2,518,561	2,337,935	92,83

Persentase kelulusan siswa SMP sejak tahun 2004/2005 sampai dengan 2006/2007 mengalami kenaikan yang cukup besar. Tingkat kenaikan persentase kelulusan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut: dari tahun 2004/2005 ke 2005/2006 sebesar 5,33%; dan dari tahun 2005/2006 ke tahun 2006/2007 sebesar 1,48%. Hal ini mengindikasikan makin meratanya mutu lulusan dan makin sedikitnya jumlah peserta UN yang tidak lulus. Meskipun demikian, pada tahun ajaran 2007/2008 terdapat penurunan persentase kelulusan sebesar 1,01%.

## 3. Angka Mengulang Kelas

Pada tahun 2006/2007 angka mengulang kelas SMP/MTs dapat dikatakan rendah, yaitu 0.53%. Walaupun secara persentase terlihat kecil (dibawah 1%), akan tetapi apabila dilihat dari angka absolutnya cukup tinggi, yaitu 42.532 siswa. Sedangkan angka mengulang kelas untuk tiap tingkat masing-masing sebesar 0.52%, 0.57% dan 0.49% untuk kelas VII, VIII,

## BAB V KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PROGRAM 2009

Agar program yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program antara pusat, daerah, dan sekolah. Koordinasi dan sinkronisasi dilaksanakan dengan mengacu pada tugas pusat, daerah (provinsi/kabupaten/kota), dan sekolah.

### A. Tugas Pusat

Program dan kegiatan peningkatan mutu SMP di seluruh Indonesia pada tingkat pusat ditangani oleh Direktorat Pembinaan SMP dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan di provinsi yaitu Satker Peningkatan Mutu dan Perluasan SMP (Dekonsentrasi), dan DBEP.
2. Menyusun panduan pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan kegiatan pembangunan pendidikan SMP.
3. Melaksanakan sosialisasi, koordinasi, dan supervisi pelaksanaan program dan seluruh kegiatan baik di Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun sekolah.
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satker.
5. Melakukan analisa proses dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan untuk perumusan kebijakan pembangunan pendidikan tahun berikutnya.
6. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.
7. Memberikan penghargaan kepada daerah yang melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan dengan baik dan benar, serta memberikan hukuman terhadap penyimpangan pengelolaan program dan kegiatan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun di Sekolah.

pendidikan warga Negara Indonesia, yaitu SMP atau yang setara dengan SMP dengan mutu yang baik. Program ini melibatkan banyak pihak, baik instansi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sekolah, dan partisipasi masyarakat luas.

Salah satu bentuk upaya penuntasan untuk mensosialisasikan dan mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu adalah dengan melibatkan berbagai unsure terkait di daerah secara langsung melalui Program Dekonsentrasi yang berada di provinsi. Program dekonsentrasi adalah program yang dananya berasal dari pusat yang bersifat stimulus bagi provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan undang-undang otonomi daerah. Sedangkan untuk mendapat gambaran komunikasi, sinkronisasi, dan keterlaksanaan kebijakan tersebut, maka diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap persiapan, pelaksanaan, hasil dan dampak dari program dekonsentrasi tersebut.

## 2) Kegiatan Penguatan dan Pemanfaatan Subsidi Dekon

Dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu, terdapat beberapa program terutama subsidi ke sekolah yang pelaksanaannya dikelola oleh provinsi. Pertimbangannya adalah agar program yang dimaksud dapat tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan sekolah yang beragam. Subsidi dekon ini meliputi subsidi pembimbingan KTSP, beasiswa siswa miskin, beasiswa SMP Terbuka, beasiswa bakat dan prestasi, alat IPA, alat TIK, dan pembangunan SD-SMP Satu Atap.

dan IX SMP. Tabel 2.6 menunjukkan data angka mengulang kelas SMP/MTs untuk setiap provinsi.

**Tabel-2.6 Angka mengulang SMP/MTs antar Propinsi Tahun 2006/2007**

No.	Provinsi	Tingkat			Rata-rata	Jumlah Siswa Mengulang
		VII	VIII	IX		
1	DKI Jakarta	0.67	1.12	0.10	0.63	2,378
2	Jawa Barat	0.16	0.24	0.10	0.17	2,032
3	Banten	0.21	0.38	0.19	0.25	766
4	Jawa Tengah	0.32	0.37	0.43	0.37	4,418
5	DI Yogyakarta	0.26	0.45	0.36	0.35	469
6	Jawa Timur	0.30	0.40	0.21	0.31	3,394
7	NAD	0.72	0.99	1.29	0.97	1,891
8	Sumatera Utara	0.53	0.40	0.35	0.44	2,676
9	Sumatera Barat	1.44	1.22	0.37	1.01	1,908
10	Riau	0.87	0.85	0.79	0.84	1,480
11	Kepulauan Riau	1.45	2.01	7.48	3.28	1,165
12	Jambi	1.38	0.48	0.27	0.72	740
13	Sumatera Selatan	0.72	0.64	0.33	0.58	1,603
14	Bangka Belitung	0.93	1.05	0.17	0.70	295
15	Bengkulu	1.44	1.55	1.68	1.54	1,118
16	Lampung	0.26	0.22	0.22	0.24	666
17	Kalimantan Barat	1.22	1.59	3.18	1.91	3,191
18	Kalimantan Tengah	0.64	0.54	0.58	0.59	375
19	Kalimantan Selatan	1.18	0.84	0.65	0.92	845
20	Kalimantan Timur	0.57	0.62	0.25	0.50	623
21	Sulawesi Utara	0.28	0.40	0.34	0.34	311
22	Gorontalo	0.38	0.66	0.31	0.45	140
23	Sulawesi Tengah	0.36	0.50	0.22	0.36	301
24	Sulawesi Selatan	0.74	0.78	0.80	0.77	2,266
25	Sulawesi Barat	0.62	0.71	0.55	0.63	243
26	Sulawesi Tenggara	0.53	0.56	1.13	0.74	737
27	Maluku	1.99	2.27	2.06	2.10	1,406
28	Maluku Utara	3.06	3.10	2.87	3.02	1,114
29	Bali	0.11	0.18	0.05	0.11	164
30	Nusa Tenggara Barat	0.38	0.50	0.56	0.47	710
31	Nusa Tenggara Timur	0.69	1.06	1.71	1.09	1,964
32	Papua	1.31	0.97	1.18	1.15	933
33	Papua Barat	1.36	1.32	0.22	0.97	210
	<b>Indonesia</b>	<b>0.52</b>	<b>0.57</b>	<b>0.49</b>	<b>0.53</b>	<b>42,532</b>

Sumber : Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Depdiknas, 2007

Walau angka mengulang kelas pada tingkat nasional mengembirakan, provinsi-provinsi tertentu memiliki angka mengulang kelas yang tinggi. Artinya secara nasional sudah cukup baik, tetapi ternyata masih ada sejumlah daerah yang memiliki angka mengulang kelas cukup tinggi. Provinsi-provinsi ini perlu melakukan upaya-upaya khusus untuk menekan angka mengulang kelasnya.

Angka mengulang kelas ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti: (a) pola pembelajaran di kelas kurang menarik, (b) bekal awal siswa pada saat masuk kelas VII tidak memadai, dan (c) sarana dan prasarana pembelajaran yang dimiliki sekolah belum memadai untuk menunjang pembelajaran yang optimal. Penyebab-penyebab tersebut perlu diperhatikan semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran sehingga secara terus menerus dapat mengurangi angka mengulang kelas.

#### 4. Angka Putus Sekolah

Secara nasional, angka putus sekolah SMP/MTs pada tahun 2006/2007 sebesar 2.88%. Walaupun persentase ini kelihatan kecil, angka absolut anak putus sekolah ternyata cukup besar, karena jumlah siswa SMP/MTs besar. Tabel berikut menunjukkan angka putus sekolah per provinsi di seluruh Indonesia.

**Tabel-2.7 Angka Putus Sekolah SMP/MTs antar Propinsi Tahun 2006/2007**

No.	Provinsi	Jumlah	%
1	DKI Jakarta	7,053	1.87
2	Jawa Barat	25,723	2.11
3	Banten	10,112	3.35
4	Jawa Tengah	30,515	2.58
5	DI Yogyakarta	2,828	2.14
6	Jawa Timur	22,203	2.01
7	Nanggroe Aceh Darussalam	6,763	3.46
8	Sumatera Utara	19,842	3.23
9	Sumatera Barat	5,487	2.91
10	R i a u	4,169	2.37
11	Kepulauan Riau	2,662	7.50
12	J a m b i	3,553	3.46
13	Sumatera Selatan	7,894	2.85
14	Bangka Belitung	1,842	4.36
15	Bengkulu	4,933	6.78
16	Lampung	6,994	2.48
17	Kalimantan Barat	7,729	4.64
18	Kalimantan Tengah	1,717	2.70
19	Kalimantan Selatan	3,428	3.73

lebih 303 sekolah menengah pertama di 23 kecamatan tersebut. Pada tahun 2009 juga akan dipilih kecamatan baru yang akan dilibatkan dalam program REDIP-G.

REDIP-G diimplementasikan atas dasar kebutuhan sekolah (berbasis rencana sekolah) dan didanai dengan subsidi (grant) menggunakan sistem paket senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Penentuan jumlah paket ke sekolah pada dasarnya ditentukan oleh jumlah siswa sekolah yang bersangkutan, artinya sekolah yang jumlah siswanya lebih banyak memperoleh paket atau subsidi lebih besar. REDIP-G juga diimplementasikan di tingkat kecamatan melalui Tim Pengembang Pendidikan Kecamatan (TPK).

#### 6) Pembinaan SMP Terbuka

Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu memerlukan langkah-langkah konkrit untuk menjangkau anak-anak dari masyarakat lapis bawah yang kurang beruntung karena kondisi sosial ekonomi yang jumlahnya cukup besar. Hal ini dilakukan agar mereka dapat terlayani sehingga mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan sebagaimana anak-anak lainnya. Untuk itu, Direktorat Pembinaan SMP mengembangkan SMP Terbuka. Masing-masing induk SMP Terbuka mengelola Tempat Kegiatan belajar (TKB) Reguler saja atau TKB Reguler dan TKB Mandiri. Mengingat TKB Mandiri adalah TKB yang dikelola yayasan namun tetap menginduk ke SMP Terbuka, maka penyelenggaraan kegiatannya sama dengan TKB Reguler.

Untuk penyelenggaraan SMP Terbuka ini, Direktorat Pembinaan SMP telah memasukkan siswa SMP Terbuka (TKB Reguler dan TKB Mandiri) masuk dalam mekanisme BOS. Disamping itu siswa SMP Terbuka juga diberikan beasiswa sebesar Rp. 300.000 /tahun/bulan.

### 3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik

#### a. Sistem Pengendalian Intern

##### 1) Supervisi Pelaksanaan program Dekonsentrasi

Program Waib Belajar 9 Tahun yang dimulai pada tahun 1994 merupakan upaya untuk meningkatkan standar minimal

- c) Angka putus sekolah (DO) SD/MI dan SMP/MTs lima tahun terakhir
- d) Angka mengulang kelas SD/MI dan SMP/MTs lima tahun terakhir
- e) Angka melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs lima tahun terakhir
- f) Keadaan daya tampung dan jumlah tenaga guru yang tersedia
- g) Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, termasuk koordinasi antar instansi terkait
- h) Tingkat pelayanan pendidikan

Pada tahun 2009 *block grant* Widyakrama dianugerahkan kepada 6 kabupaten/kota dan 3 Provinsi pemenang penghargaan Widyakrama tahun 2008, yaitu: 1) Kabupaten/Kota : a) Kabupaten Jember; b) Kabupaten Bondowoso; c) Kabupaten Kendal; d) Kabupaten Banyuwangi; e) Kota Bukittinggi dan f) Kota Malang. 2) Provinsi : a) Riau; b) Sumatera Barat; c) Jawa Tengah.

##### 5) Pembinaan SMP Berbasis Masyarakat (REDIP-G)

*Regional Education Development and Improvement Program* (REDIP) atau Program Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Daerah adalah program yang dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai proyek percontohan di provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Utara. Sejak tahun 2005 dikembangkan juga di provinsi Banten. Program terbatas di tiga provinsi ini dibiayai dengan dana bantuan dari Japan International Cooperation Agency (JICA).

Sebagai tindak lanjut dari program ini, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas mengimplementasikan program REDIP di 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor, Tangerang dan Bekasi. Karena program ini dibiayai dengan APBN pemerintah Indonesia, maka disebut REDIP-G (Regional Education Development and Improvement Program - Government).

Sasaran REDIP-G adalah seluruh sekolah menengah pertama negeri dan swasta di Kabupaten Bogor, Tangerang dan Bekasi. Di setiap kabupaten dikembangkan di 7-8 kecamatan dengan membentuk Tim Pengembang Pendidikan Kecamatan (TPK). Dengan demikian, program ini melibatkan 23 TPK dan kurang

No.	Provinsi	Jumlah	%
20	Kalimantan Timur	3,882	3.10
21	Sulawesi Utara	3,269	3.54
22	Gorontalo	2,270	7.28
23	Sulawesi Tengah	3,906	4.67
24	Sulawesi Selatan	10,085	3.44
25	Sulawesi Barat	2,340	6.02
26	Sulawesi Tenggara	4,335	4.35
27	Maluku	2,792	4.16
28	Maluku Utara	766	2.07
29	B a l i	3,792	2.64
30	Nusa Tenggara Barat	6,718	4.47
31	Nusa Tenggara Timur	9,475	5.24
32	Papua	2,884	3.55
33	Papua Barat	873	4.01
	<b>Indonesia</b>	<b>232,834</b>	<b>2.88</b>

Sumber : Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Depdiknas, 2007

Angka putus sekolah SMP/MTs di tingkat provinsi pada tahun 2006/2007 sangat beragam dengan rentangan 1.87 % - 7.5%. Ada 11 provinsi yang memiliki angka putus sekolah di atas rata-rata nasional dan 22 provinsi yang memiliki angka putus sekolah SMP/MTs di atas angka nasional (2.88%). Di antara provinsi yang berada di bawah angka nasional adalah Provinsi DKI Jakarta (1.87%), Jawa Timur (2.01%). Sedangkan provinsi yang mempunyai angka putus sekolah di atas angka nasional dengan angka tertinggi adalah Kepulauan Riau (7.50%) dan Gorontalo (7.28%).

Untuk mempertahankan siswa SMP/MTs agar tidak putus sekolah perlu diupayakan antara lain: (a) sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak, (b) memberikan motivasi kepada siswa bahwa mereka dapat menyelesaikan pendidikan apabila sungguh-sungguh dan rajin belajar, (c) memberikan dukungan beasiswa, dan (d) melakukan pendekatan sosial budaya agar anak tidak terkendala sosial-budaya setempat dalam menyelesaikan pendidikannya, serta (e) mempersiapkan anak yang baru masuk SMP secara baik (matrikulasi). Lima upaya tersebut perlu dimaksimalkan untuk menekan siswa putus sekolah.

## 5. Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan dari SD ke SMP secara nasional pada tahun 2006/2007 sebesar 82.03%. Data rinci untuk setiap provinsi dapat dilihat pada Tabel 2.8

Data tersebut menunjukkan masih ada 17.97% lulusan SD yang belum melanjutkan ke tingkat SMP. Anak-anak tersebut perlu memperoleh dorongan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya seperti di SMP atau MTs. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan khusus mereka juga dapat ditampung pada lembaga pendidikan alternatif seperti SMP Terbuka, Pondok Pesantren, Paket B, dan SD-SMP Satu Atap.

Tabel 2.8 menunjukkan ada 20 provinsi yang memiliki angka melanjutkan lebih tinggi dari angka nasional (82.03%) dengan angka tertinggi 111.40% di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan terdapat 13 Provinsi yang mempunyai angka melanjutkan yang lebih rendah dari angka nasional, dengan angka terendah 64.01% di Provinsi Lampung.

Angka melanjutkan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan beberapa provinsi lainnya seperti DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Utara dan Papua yang lebih dari 100 persen terjadi karena ada lulusan SD/MI/ sederajat dari provinsi lain di sekitar provinsi-provinsi tersebut yang melanjutkan ke SMP/MTs/ sederajat di wilayahnya. Kasus yang sama juga dapat terjadi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, sehingga angka melanjutkan di suatu ibukota provinsi pada umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya.

**Tabel-2.8 Angka Melanjutkan ke SMP/MTs antar Propinsi Tahun 2006/2007**

No.	Provinsi	Jumlah Lulusan SD	Jumlah Melanjutkan ke SMP	Angka Melanjutkan ke SMP
1	DKI Jakarta	122,545	125,450	102.37
2	Jawa Barat	652,723	445,908	68.32
3	Banten	172,391	116,810	67.76
4	Jawa Tengah	519,688	426,393	82.05
5	DI Yogyakarta	45,060	48,554	107.75
6	Jawa Timur	474,872	402,632	84.79
7	NAD	73,101	81,436	111.40
8	Sumatera Utara	255,330	228,197	89.37

2. Memperlancar pelaksanaan kegiatan-kegiatan perluasan akses, peningkatan mutu SMP, dan peningkatan manajemen SMP secara efektif dan efisien.
3. Terseleksinya sasaran dan terselenggaranya kegiatan-kegiatan perluasan akses, peningkatan mutu SMP, dan peningkatan manajemen SMP yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota.
4. Berkembangnya peran dan kapasitas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam tahap persiapan, implementasi, pemantauan/evaluasi, serta penyusunan tindak lanjut kegiatan pembangunan pendidikan kabupaten/kota.
5. Berkembangnya partisipasi masyarakat dalam penyediaan layanan pendidikan yang bermutu.

## 4) Pemberian Penghargaan Widyakrama

Dalam rangka mensukseskan program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan Tahun yang bermutu, sejak tahun 1997 setiap tahun pemerintah pusat memberikan penghargaan 'Widyakrama' kepada kabupaten/kota dan provinsi yang dinilai berhasil baik dalam mensukseskan program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Oleh karena itu, pada tahun 2009 pemerintah pusat kembali akan memberikan penghargaan berbentuk *block grant* Widyakrama kepada 6 (enam) kabupaten/kota dan 3 (tiga) provinsi pemenang penghargaan Widyakrama tahun 2008 melalui seleksi dari seluruh kabupaten/ kota di Indonesia.

Tujuan dari pemberian penghargaan Widyakrama adalah untuk lebih mendorong pemerintah kabupaten/kota serta segenap lapisan masyarakat dalam melaksanakan program percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan mutu yang memadai.

Penghargaan Widyakrama dianugerahkan kepada kabupaten/ kota yang dinilai sukses melaksanakan program percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Keberhasilan itu ditentukan melalui evaluasi dan pemantauan oleh tim penilai khusus Widyakrama dengan memperhatikan indikator-indikator berikut.

- a) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka partisipasi Murni (APM) lima tahun terakhir
- b) Prediksi kemampuan menuntaskan program Wajib sejak lima tahun terakhir

Pengelola kegiatan-kegiatan pembangunan pendidikan SMP di tingkat kabupaten/kota adalah **Tim Teknis Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP Kabupaten/Kota (disingkat TTK)**. Tim ini mengelola kegiatan-kegiatan Direktorat Pembinaan SMP baik perluasan dan pemerataan layanan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, maupun peningkatan manajemen pendidikan.

Selain alasan efektifitas dan efisiensi kerja, pembentukan TTK di Kabupaten/Kota ini sejalan dengan semangat otonomi daerah. Sesuai dengan UU RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU no. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana sektor pendidikan menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu pembangunan pendidikan dengan biaya Pemerintah Pusat (APBN) melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dana dari pusat hanya merupakan pelengkap dari dana yang dialokasikan dari APBD.

Sejak beberapa tahun terakhir pemerintah telah merintis pelaksanaan pembangunan pendidikan baik fisik maupun non-fisik melalui mekanisme pemberian subsidi dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dana subsidi disalurkan kepada sasaran (terutama sekolah) secara langsung. Mereka diberi wewenang untuk mengelola dana tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang telah diatur dalam panduan. Kegiatan yang dilaksanakan dengan mekanisme subsidi menunjukkan hasil yang sesuai dengan tujuan kegiatan, bahkan dalam banyak hal lebih baik dari pada yang direncanakan. Mekanisme partisipasi masyarakat telah menjadikan sebagian anggota masyarakat sadar akan tanggungjawabnya dalam pembangunan pendidikan dan meningkatkan rasa turut memiliki mereka terhadap institusi-institusi pendidikan.

Melalui fungsi dan tugasnya, diharapkan TTK dapat menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan pendidikan yang diprogramkan oleh Direktorat Pembinaan SMP di tingkat kabupaten/kota dengan baik dan berkembangnya partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Tujuan dibentuknya Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah:

1. Meningkatkan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan sekolah dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan perluasan akses, peningkatan mutu SMP, dan peningkatan manajemen SMP.

No.	Provinsi	Jumlah Lulusan SD	Jumlah Melanjutkan ke SMP	Angka Melanjutkan ke SMP
9	Sumatera Barat	79,655	71,671	89.98
10	Riau	82,426	64,418	78.15
11	Kepulauan Riau	17,202	14,399	83.71
12	Jambi	48,352	35,850	74.14
13	Sumatera Selatan	122,166	108,063	88.46
14	Bangka Belitung	16,656	16,032	96.25
15	Bengkulu	31,928	29,946	93.79
16	Lampung	153,697	98,388	64.01
17	Kalimantan Barat	81,338	66,055	81.21
18	Kalimantan Tengah	40,702	29,671	72.90
19	Kalimantan Selatan	52,736	39,385	74.68
20	Kalimantan Timur	52,458	50,397	96.07
21	Sulawesi Utara	34,862	37,065	106.32
22	Gorontalo	18,954	16,313	86.07
23	Sulawesi Tengah	40,277	32,016	79.49
24	Sulawesi Selatan	140,722	112,722	80.10
25	Sulawesi Barat	18,223	15,927	87.40
26	Sulawesi Tenggara	43,210	36,078	83.49
27	Maluku	27,499	28,383	103.21
28	Maluku Utara	19,898	16,302	81.93
29	Bali	54,119	59,323	109.62
30	Nusa Tenggara Barat	86,308	62,583	72.51
31	Nusa Tenggara Timur	79,079	77,324	97.78
32	Papua	31,277	32,860	105.06
33	Papua Barat	11,418	9,162	80.24
	<b>Indonesia</b>	<b>3,700,872</b>	<b>3,035,713</b>	<b>82.03</b>

Sumber : Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Depdiknas, 2007

Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs terkait dengan faktor: (a) apakah lulusan SD/MI dan orang tua mereka merasa pendidikan di SMP/MTs/ sederajat penting dan memberi arti bagi kehidupan mereka, (b) apakah di sekitar tempat tinggal mereka terdapat SMP/MTs/ sederajat yang dapat dijangkau, (c) apakah mereka tidak kesulitan mendapatkan biaya sekolah, dan (d) apakah mereka tidak terkendala oleh faktor sosial-budaya setempat untuk melanjutkan ke SMP/MTs/ sederajat. Upaya meningkatkan angka melanjutkan ke SMP/MTs harus memperhatikan empat faktor tersebut.

## 6. Rasio Siswa Guru dan Siswa Kelas

Rasio siswa guru merupakan indikator mutu input pendidikan, karena rasio yang baik antara siswa dengan guru dapat diharapkan proses pembelajaran berjalan baik pula. Idealnya perbandingan antara siswa dan guru tidak terlalu besar, sehingga jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar tidak terlalu besar dan beban jam mengajar guru juga tidak terlalu banyak.

Rasio antara siswa-guru SMP menunjukkan angka lebih kecil, yakni secara nasional sebesar 14. Hal ini dapat dipahami karena jumlah guru di SMP adalah guru mata pelajaran, sehingga penyediaan tenaga guru berdasarkan kebutuhan mata pelajaran yang diberikan pada tingkat SMP. Sedangkan rasio siswa-kelas secara nasional sebesar 1 : 37. Data secara rinci untuk masing-masing provinsi dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Dilihat secara nasional, rasio siswa-kelas memang sudah cukup memadai, hanya ada 1 provinsi, yaitu Lampung yang mempunyai rasio siswa kelas sebanyak 40 orang. Namun demikian, karena BSNP menetapkan standar rasio kelas siswa sebesar 1 : 32, maka rasio yang ada selama ini masih perlu diperkecil.

Tabel berikut menggambarkan perbandingan antara kelas dengan siswa dan guru dengan siswa.

**Tabel 2.9 Rasio Kelas Siswa dan Guru Siswa SMP/MTs tiap Propinsi Tahun 2006/2007**

No.	Provinsi	Siswa/ Sekolah	Siswa/ Kelas	Siswa/ Guru*)
1	DKI Jakarta	387	38	17
2	Jawa Barat	446	37	16
3	Banten	439	39	18
4	Jawa Tengah	433	38	15
5	DI Yogyakarta	330	36	11
6	Jawa Timur	349	37	12
7	N A D	357	37	12
8	Sumatera Utara	347	38	15
9	Sumatera Barat	370	34	11
10	R i a u	282	35	12
11	Kepulauan Riau	229	32	12
12	J a m b i	231	34	11
13	Sumatera Selatan	318	35	12

untuk mengefisienkan biaya pengelolaan atau manajemen program yang dilaksanakan di tingkat provinsi.

### 2) Workshop Provinsi dalam rangka perencanaan Wajar

Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu sebenarnya bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Meskipun sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara penuntasan wajib belajar secara nasional selesai tahun 2008, namun masih dijumpai 76 kabupaten yang APK-nya masih 80%, artinya masih jauh dari tuntas paripurna 95%.

Di samping itu, pada provinsi dan kabupaten/kota yang telah mencapai APK 95% pun masih terdapat kabupaten dan kecamatan-kecamatan yang APK-nya belum tuntas, padahal sebagian anak-anak yang berusia 13-15 tahun justru berada di sana.

Untuk menjangkau kabupaten-kabupaten dan kecamatan-kecamatan yang masih menjadi kantong-kantong anak-anak usia 13 – 15 tahun yang belum terlayani (*the unreached*), maka kegiatan sosialisasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu masih tetap diperlukan, dan justru penuntasan terhadap mereka ini merupakan tugas yang lebih berat serta memerlukan strategi yang lebih khusus.

Tujuan utama dilaksanakannya workshop provinsi dalam rangka perencanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan memperoleh dukungan serta partisipasi yang seluas-luasnya dari seluruh lapisan masyarakat untuk menyelesaikan program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan Tahun yang bermutu.

### 3) Koordinasi tingkat provinsi dan kabupaten

Pengelola kegiatan-kegiatan pembangunan pendidikan SMP di tingkat provinsi adalah **Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP (Dekonsentrasi) Provinsi**. Kegiatan Dekonsentrasi ini mengelola kegiatan-kegiatan Direktorat Pembinaan SMP baik perluasan dan pemerataan layanan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, maupun peningkatan manajemen pendidikan.

pendidikan nasional yang bermutu melalui pencapaian standar pelayanan minimal (SPM).

Subsidi TIK tahun 2009 adalah untuk SMP negeri dan swasta dan diprioritaskan untuk rintisan SBI, SMP SSN, yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi.

## 2) Multimedia Interaktif

Seiring dengan perluasan akses sebagai upaya penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, peningkatan mutu pendidikan perlu diupayakan secara optimal. Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMP dalam peningkatan mutu pendidikan adalah pemberian subsidi multimedia interaktif untuk SMP yang disalurkan langsung dari pemerintah pusat maupun yang dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi.

Subsidi multimedia interaktif diberikan kepada SMP yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi. Subsidi diberikan dalam bentuk dana kepada sekolah untuk mengadakan peralatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan dilaksanakannya program pemberian subsidi multimedia interaktif, adalah: menyediakan peralatan pendidikan bagi SMP untuk menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas; meningkatkan pencapaian kompetensi (prestasi) siswa; mendorong terwujudnya penyelenggaraan SMP yang mandiri berdasarkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); serta meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan nasional yang bermutu melalui pencapaian standar pelayanan minimal (SPM).

## e. Penunjang Lainnya

### 1) Pengelolaan BOS

Seperti yang telah diuraikan di atas, pengelolaan dana BOS SMP tahun 2009 merupakan tugas Direktorat SMP, terpisah pengelolaannya dengan BOS SD. Di tingkat provinsi, bila pada tahun 2008 pengelolaan atau manajemen BOS merupakan suatu kegiatan tersendiri, maka pada tahun 2009 ini pengelolaan BOS SMP merupakan salah satu sub kegiatan didalam Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP. Hal ini dimaksudkan

No.	Provinsi	Siswa/ Sekolah	Siswa/ Kelas	Siswa/ Guru*)
14	Bangka Belitung	280	36	15
15	Bengkulu	280	36	15
16	Lampung	311	40	12
17	Kalimantan Barat	230	37	14
18	Kalimantan Tengah	168	33	11
19	Kalimantan Selatan	247	33	10
20	Kalimantan Timur	275	33	12
21	Sulawesi Utara	175	32	11
22	Gorontalo	214	35	12
23	Sulawesi Tengah	214	35	12
24	Sulawesi Selatan	315	34	12
25	Sulawesi Barat	292	34	15
26	Sulawesi Tenggara	315	34	14
27	Maluku	188	31	8
28	Maluku Utara	200	31	10
29	B a l i	488	37	14
30	Nusa Tenggara Barat	425	38	14
31	Nusa Tenggara Timur	285	34	15
32	Papua	237	36	13
33	Papua Barat	190	36	10
	<b>Indonesia</b>	<b>342</b>	<b>37</b>	<b>14</b>

Sumber : Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Depdiknas, 2007

Rasio ideal untuk siswa guru di SMP/MTs tidak mudah dirumuskan. Namun jika digunakan pedoman siswa per kelas 32 orang, jumlah jam mengajar guru per minggu 24 jampelajaran, jumlah jam pelajaran per minggu 40 jam pelajaran, maka secara umum rasio siswa guru yang ideal sebesar 1 : 24. Dengan demikian data pada tabel di atas menunjukkan rasio siswa guru telah memenuhi batas ideal. Namun masalah yang terjadi di lapangan adalah distribusi guru di tanah air yang tidak merata. SMP/MTs di perkotaan banyak kelebihan guru, sementara di SMP/MTs pedesaan terjadi kekurangan guru.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa di samping peningkatan kualitas guru, perlu juga upaya meratakan sebaran guru untuk mengurangi kelebihan di satu daerah dan kekurangan di daerah lainnya.

## 7. Rasio Rombongan Belajar - Ruang Kelas

Rasio kelas atau rombongan belajar dengan ruang kelas dapat digunakan untuk melihat seberapa banyak sekolah yang melaksanakan *double shift* (kelas pagi dan kelas siang/ petang).

Seperti yang tertuang pada tabel 2.10, rasio kelas ruang kelas SMP secara nasional sebesar 0.99. Data tersebut secara umum menunjukkan bahwa setiap rombongan belajar telah mempunyai ruang kelas. Meskipun demikian, kondisi ini menjadi berbeda apabila dilihat per provinsi, karena masih terdapat provinsi yang ratio kelas dengan ruang kelas di atas 1.00.

Apabila sekolah-sekolah tersebut dibedakan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, maka dapat diketahui bahwa sekolah negeri mempunyai rasio yang lebih besar dibandingkan dengan sekolah swasta. Ini berarti bahwa kekurangan ruang belajar di sekolah negeri dibandingkan dengan sekolah swasta.

**Tabel-2.10 Ratio Kelas-Ruang Kelas SMP tiap Propinsi**

No.	Provinsi	Kelas per Ruang Kelas Milik		
		Negeri	Swasta	Rata-rata
1	DKI Jakarta	1.77	0.99	1.35
2	Jawa Barat	1.20	1.09	1.16
3	Banten	1.06	0.94	1.01
4	Jawa Tengah	1.03	0.88	0.99
5	DI Yogyakarta	0.99	0.85	0.94
6	Jawa Timur	1.05	0.86	0.99
7	NAD	0.98	0.65	0.95
8	Sumatera Utara	0.94	0.87	0.91
9	Sumatera Barat	0.98	0.74	0.96
10	Riau	0.93	0.72	0.87
11	Kepulauan Riau	0.94	0.67	0.87
12	Jambi	0.90	0.99	0.92
13	Sumatera Selatan	0.78	0.89	0.80
14	Bangka Belitung	0.99	0.83	0.95
15	Bengkulu	0.74	0.89	0.75
16	Lampung	0.92	0.83	0.88
17	Kalimantan Barat	0.90	0.94	0.92
18	Kalimantan Tengah	0.86	0.83	0.85
19	Kalimantan Selatan	0.85	0.60	0.82
20	Kalimantan Timur	1.28	0.93	1.19
21	Sulawesi Utara	0.84	0.95	0.87

Lokakarya penyusunan rencana kegiatan setiap peserta tentang pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan binaan masing-masing.

## 8) Seleksi Lomba-lomba tingkat Provinsi dan Kabupaten

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan terutama dalam hal peningkatan kompetitif diantara siswa SMP telah dirancang beberapa perlombaan, baik yang berbentuk perlombaan sains seperti OSN, LPIR, maupun yang berbentuk perlombaan kreativitas, seni dan sportivitas seperti O2SN, FLS2N, Lomba Lukis, Cipta Lagu dan Cipta Puisi. Perlombaan-perlombaan tersebut dilakukan berjenjang dari tingkat kabupaten sampai dengan nasional, untuk mendapatkan calon-calon juara yang benar-benar sesuai dengan kemampuan. Oleh sebab itu dilakukan kegiatan penyeleksian peserta lomba di tingkat kabupaten dan provinsi. Selanjutnya yang berhak mewakili provinsi pada lomba tingkat nasional adalah peserta yang telah memenangkan perlombaan di tingkat provinsi.

### d. Pemanfaatan TIK

#### 1) Subsidi TIK

Seiring dengan perluasan akses sebagai upaya penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, peningkatan mutu pendidikan perlu diupayakan secara optimal. Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMP dalam peningkatan mutu pendidikan adalah pemberian subsidi TIK untuk SMP yang disalurkan langsung dari pemerintah pusat maupun yang dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi.

Subsidi TIK diberikan kepada SMP yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi. Subsidi diberikan dalam bentuk dana kepada sekolah untuk mengadakan peralatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan dilaksanakannya program pemberian subsidi TIK, adalah: menyediakan peralatan pendidikan bagi SMP untuk menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas; meningkatkan pencapaian kompetensi (prestasi) siswa; mendorong terwujudnya penyelenggaraan SMP yang mandiri berdasarkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); serta meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam menyelenggarakan

didik (siswa) untuk mencapai mutu kehidupan yang sehat. Dengan kata lain, pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba di SMP adalah upaya yang sistematis dan sistemik dalam rangka menjadikan sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang sehat guna peningkatan mutu pendidikan.

Dalam lingkungan pendidikan yang sehat, para siswa diharapkan terfasilitasi perkembangan dirinya secara optimal; sehingga menjadi manusia yang produktif serta mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupannya.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan seminar dan lokakarya pencegahan penyalahgunaan Narkoba adalah untuk:

- Mensosialisasikan informasi dan strategi pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan sekolah (SMP)
- Menjaring data dan informasi tentang upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba; dan
- Mengembangkan kemampuan aparat pendidikan dalam membuat rencana kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang terintegrasi dalam keseluruhan program pembinaan kesiswaan.

Sasaran atau peserta kegiatan ini meliputi aparat pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membina daerah rawan kasus penyalahgunaan Narkoba, yaitu lingkungan di luar sekolah yang berpotensi untuk berpengaruh terhadap timbulnya penyalahgunaan Narkoba yang melibatkan siswa dalam setting pendidikan di sekolah

Dalam pelaksanaan program ini digunakan tiga strategi kegiatan, yakni sosialisasi klinis, penyebaran format-format penyampaian informasi dan penjaringan data, dan lokakarya.

Dalam strategi sosialisasi klinis dilakukan penyebaran format-format yang bersifat informatif dan penyampaian data tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba secara dialogis dan interaktif.

Adapun data atau informasi yang disampaikan dan dijaring dari peserta berupa fasilitas penunjang pembiasaan berperilaku sehat dan kegiatan-kegiatan penyaluran energi psikologis siswa yang bersifat preventif-developmental alih-alih kuratif-terapeutik.

No.	Provinsi	Kelas per Ruang Kelas Milik		
		Negeri	Swasta	Rata-rata
22	Gorontalo	0.74	0.97	0.75
23	Sulawesi Tengah	0.96	1.11	0.98
24	Sulawesi Selatan	0.93	0.95	0.93
25	Sulawesi Barat	1.01	0.55	0.92
26	Sulawesi Tenggara	0.99	0.71	0.98
27	Maluku	0.95	1.01	0.97
28	Maluku Utara	1.24	1.29	1.25
29	Bali	1.20	1.32	1.23
30	Nusa Tenggara Barat	1.24	0.88	1.21
31	Nusa Tenggara Timur	1.15	0.71	0.95
32	Papua	0.92	0.96	0.93
33	Papua Barat	1.05	1.19	1.07
	<b>Indonesia</b>	<b>1.02</b>	<b>0.91</b>	<b>0.99</b>

Sumber : Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Depdiknas, 2007

Sesuai dengan hitungan yang dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), jumlah siswa per rombongan belajar di SMP adalah sebanyak 32 siswa per kelas. Oleh karena itu, hitungan di atas masih perlu dihitung kembali dengan menggunakan rasio per rombongan belajar sebanyak 32 siswa per kelas.

## 8. Rasio Laboratorium-Sekolah

Data pada Tabel 2.11 menunjukkan rasio laboratorium-sekolah di tingkat SMP secara nasional sebesar 71.74%, artinya dari 100 sekolah, hanya 72 sekolah memiliki laboratorium, baik laboratorium IPA, laboratorium Bahasa, atau laboratorium IPS. Tabel 2.8 menunjukkan secara nasional bahwa SMP/MTs memang masih banyak yang belum memiliki laboratorium dan ada beberapa provinsi yang kekurangan sangat besar misalnya Maluku Utara hanya 13,81%, Papua Barat 16.41%.

**Tabel 2.11 Rasio Laboratorium – Sekolah SMP/MTs tiap Propinsi Tahun 2006/2007**

No.	Provinsi	Jumlah		
		Sekolah	Lab.	%
1	DKI Jakarta	968	1,130	116.74
2	Jawa Barat	2,883	2,067	71.70
3	Banten	736	453	61.55

No.	Provinsi	Jumlah		
		Sekolah	Lab.	%
4	Jawa Tengah	2,804	2,466	87.95
5	DI Yogyakarta	417	371	88.97
6	Jawa Timur	3,239	3,330	102.81
7	NAD	615	372	60.49
8	Sumatera Utara	1,818	1,096	60.29
9	Sumatera Barat	522	502	96.17
10	Riau	644	311	48.29
11	Kepulauan Riau	165	111	67.27
12	Jambi	440	243	55.23
13	Sumatera Selatan	928	681	73.38
14	Bangka Belitung	152	65	42.76
15	Bengkulu	288	331	114.93
16	Lampung	920	543	59.02
17	Kalimantan Barat	768	321	41.80
18	Kalimantan Tengah	434	207	47.70
19	Kalimantan Selatan	415	78	18.80
20	Kalimantan Timur	497	342	68.81
21	Sulawesi Utara	564	236	41.84
22	Gorontalo	138	60	43.48
23	Sulawesi Tengah	413	420	101.69
24	Sulawesi Selatan	966	706	73.08
25	Sulawesi Barat	140	171	122.14
26	Sulawesi Tenggara	319	231	72.41
27	Maluku	390	150	38.46
28	Maluku Utara	210	29	13.81
29	Bali	319	157	49.22
30	Nusa Tenggara Barat	388	156	40.21
31	Nusa Tenggara Timur	702	273	38.89
32	Papua	356	79	22.19
33	Papua Barat	128	21	16.41
<b>Indonesia</b>		<b>24,686</b>	<b>17,709</b>	<b>71.74</b>

#### 4. Menggambarkan rasa hormat dan berbakti kepada orang tua.

Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa-siswi SMP-MTs negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Festival dan lomba seni dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat sekolah, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Pelaksanaan lomba untuk tingkat sekolah, kabupaten/ kota dan provinsi dapat diatur masing-masing.

#### 6) Pelaksanaan Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari) tingkat Nasional

SMP Terbuka adalah salah satu satuan pendidikan alternatif yang bersifat formal. Cara belajar pada SMP Terbuka adalah belajar mandiri dengan menggunakan modul, sehingga kemauan dan kemandirian mereka untuk belajar harus tinggi. Salah satu cara yang ditempuh dalam memotivasi siswa SMP Terbuka adalah dengan menyelenggarakan Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari). Lomba ini untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa SMP Terbuka dalam menyerap materi yang ada dalam modul.

Lomojari juga dimasukkan sebagai sarana untuk memberikan penghargaan kepada siswa SMP Terbuka yang berprestasi sehingga mereka diharapkan mempunyai peluang untuk dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Mekanisme pelaksanaan Lomojari dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah sampai dengan tingkat Nasional.

Wakil peserta Lomojari tingkat provinsi diseleksi secara bertahap. Peserta yang sudah terseleksi di tingkat sekolah akan di seleksi di tingkat Kabupaten/Kota. Setiap kelompok peserta dari kab/kota yang lolos akan diseleksi di tingkat provinsi. Pemenang pertama di tingkat provinsi berhak mewakili provinsi untuk Lomojari tingkat Nasional yang dilaksanakan sebelum tanggal 17 Agustus 2009.

#### 7) Semiloka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Pencegahan penyalahgunaan narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada dasarnya merupakan upaya sadar penciptaan sistem lingkungan pendidikan yang kondusif dalam bentuk pembelajaran, pembimbingan, dan atau pelatihan yang membekali pemahaman, pengalaman, keterampilan, dan kontrol diri pada setiap peserta

## Tema

Tema lomba penelitian ilmiah remaja tahun 2009 adalah “Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengembangan Iptek untuk pembangunan yang berkesinambungan”.

Sedangkan sub temanya adalah: ‘membangun kreativitas dan inovasi siswa dengan memanfaatkan sumber daya alam dan potensi lingkungan sekitarnya melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi’.

### Lomba Lukis, Cipta Lagu dan Cipta Puisi

Dalam rangka memberikan kesempatan berkreasi dan mengembangkan potensi siswa SMP di bidang seni lukis, penciptaan lagu dan puisi, perlu diselenggarakan suatu wadah kegiatan yang mampu menampung ekspresi siswa. Event itu diharapkan mampu menjembatani berbagai kegiatan seni serta mampu mengangkat potensi yang dimiliki siswa hingga dapat memberikan prestasi dan kebanggaan bagi dunia pendidikan pada khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Dengan dasar alasan tersebut, Direktorat Pembinaan SMP menyelenggarakan kegiatan lomba lukis, cipta lagu dan cipta puisi Tahun 2009.

Tujuan diselenggarakannya lomba ini adalah menggali dan mengakomodasi kreativitas siswa SMP/ MTs dalam menciptakan lukisan, lagu dan puisi yang sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya, memberi dorongan kepada para siswa SMP/M.Ts dalam upaya pembinaan dan penyaluran bakat seni khususnya seni lukis, musik dan puisi di kalangan pelajar, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa cinta tanah air dan saling menghargai antar sesama pelajar.

Tema lomba seni lukis adalah ‘Selamatkan Bumiku’. Sedangkan tema lomba cipta puisi balada terbuka/bebas, tergantung kepada kebijakan panitia di setiap daerah/tingkat lomba.

Tema lomba cipta lagu bagi siswa SMP/MTs tahun 2009 adalah:

1. Memupuk rasa cinta tanah air bangsa dan negara Indonesia.
2. Mengagumi dan mensyukuri alam semesta ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
3. Menghargai jasa-jasa para pahlawan bangsa Indonesia.

## 9. Rasio Perpustakaan -Sekolah

Data pada Tabel 2.12 menunjukkan rasio perpustakaan-sekolah di tingkat SMP secara nasional sebesar 63.33%, artinya dari 100 sekolah, kurang lebih baru 63 sekolah yang memiliki perpustakaan. Tabel 2.9 juga menunjukkan secara nasional bahwa masih banyak SMP/MTs yang belum memiliki perpustakaan dan ada beberapa provinsi yang persentase kepemilikan perpustakaan di sekolah sangat kurang, misalnya Kalimantan Selatan hanya 15,66%, Maluku 31,79%.

**Tabel 2.12 Rasio Perpustakaan– Sekolah SMP/MTs tiap Propinsi Tahun 2006/2007**

No.	Provinsi	Jumlah / Total		
		Sekolah	Perpus.	%
1	DKI Jakarta	968	844	87.19
2	Jawa Barat	2,883	1,872	64.93
3	Banten	736	308	41.85
4	Jawa Tengah	2,804	2,238	79.81
5	DI Yogyakarta	417	400	95.92
6	Jawa Timur	3,239	2,317	71.53
7	NAD	615	423	68.78
8	Sumatera Utara	1,818	1,067	58.69
9	Sumatera Barat	522	421	80.65
10	Riau	644	312	48.45
11	Kepulauan Riau	165	107	64.85
12	Jambi	440	303	68.86
13	Sumatera Selatan	928	577	62.18
14	Bangka Belitung	152	72	47.37
15	Bengkulu	288	211	73.26
16	Lampung	920	479	52.07
17	Kalimantan Barat	768	420	54.69
18	Kalimantan Tengah	434	222	51.15
19	Kalimantan Selatan	415	65	15.66
20	Kalimantan Timur	497	317	63.78
21	Sulawesi Utara	564	271	48.05
22	Gorontalo	138	89	64.49
23	Sulawesi Tengah	413	196	47.46
24	Sulawesi Selatan	966	659	68.22
25	Sulawesi Barat	140	55	39.29
26	Sulawesi Tenggara	319	229	71.79
27	Maluku	390	124	31.79

28	Maluku Utara	210	74	35.24
29	B a l i	319	251	78.68
30	Nusa Tenggara Barat	388	152	39.18
31	Nusa Tenggara Timur	702	365	51.99
32	Papua	356	144	40.45
33	Papua Barat	128	49	38.28
<b>I n d o n e s i a</b>		<b>24,686</b>	<b>15,633</b>	<b>63.33</b>

Sumber : Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Depdiknas, 2007

## 10. Kelayakan Mengajar Guru

Guru layak mengajar mempunyai peran strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP. Kelayakan guru mengajar, dapat dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan dan kesesuaian mengajar dengan latar belakang pendidikannya. Tabel berikut menggambarkan persentase dan jumlah guru layak mengajar pada jenjang SMP.

**Tabel 2.13 Persentase dan Jumlah Guru SMP Layak Mengajar tiap Propinsi Tahun 2006/2007**

No.	P r o v i n s i	Negeri	Swasta	Total	Jumlah
		%	%	%	
1	DKI Jakarta	78.49	88.88	82.67	17,782
2	Jawa Barat	86.61	74.20	81.67	67,427
3	Banten	86.77	73.45	80.02	14,650
4	Jawa Tengah	84.86	75.13	81.55	65,455
5	DI Yogyakarta	86.69	76.72	83.36	10,258
6	Jawa Timur	92.85	84.32	89.58	81,153
7	NAD	81.31	71.14	80.34	14,501
8	Sumatera Utara	70.59	74.69	72.46	30,091
9	Sumatera Barat	84.46	82.19	84.15	14,813
10	R I a u	78.50	61.48	73.57	11,359
11	Kepulauan Riau	70.81	62.56	68.76	2,223
12	J a m b i	80.99	69.01	78.65	7,571
13	Sumatera Selatan	77.51	67.34	73.21	18,411
14	Bangka Belitung	79.21	54.85	73.98	2,130
15	Bengkulu	80.45	77.38	80.20	4,334
16	Lampung	67.49	66.43	67.00	16,462

Mandikdasmen akan menyelenggarakan Pekan Seni dan Sastra bagi siswa SMP, SMP Terbuka, dan MTs baik negeri maupun swasta.

Cabang-cabang yang akan dilombakan dalam FLS2N ini adalah : 1) Seni Kriya/Pahat, 2) Vokal Grup/Folk Song, 3) Kreativitas Seni Tari, 4) Lomba Membaca Al-Qur'an, 5) Cipta Cerpen, 6) Kreativitas cerita berbahasa Inggris (*story telling*). 7) Seni Musik Tradisional, 8) Menyanyi tunggal (solo).

## 5) Lomba LPIR/Cipta Puisi dan Lagu

### Lomba LPIR

#### Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi, maka diperlukan peningkatan kualitas pendidikan. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan merupakan usaha yang penting bagi masa depan generasi muda agar mampu berperan dan berkompetisi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai usaha dalam peningkatan mutu pendidikan maka Direktorat Pembinaan SMP menyelenggarakan program-program peningkatan mutu melalui kegiatan lomba penelitian ilmiah remaja (LPIR). Ruang lingkup LPIR 2009 adalah inovasi teknologi.

#### Tujuan

Tujuan umum lomba penelitian ilmiah remaja adalah untuk meningkatkan apresiasi siswa terhadap inovasi teknologi.

Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran siswa SMP-MTs tentang pentingnya teknologi terapan.
- 2) Menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas, dan inovasi.
- 3) Menyediakan ajang komunikasi ilmiah bagi kelompok ilmiah remaja (KIR)
- 4) Menumbuhkembangkan suasana kompetitif yang sehat.
- 5) Mengembangkan kreativitas dan inovasi siswa melalui pendekatan ilmiah.
- 6) Mengembangkan kemampuan guna melakukan komunikasi secara ilmiah

Sasaran peserta adalah siswa SMP yang memenuhi syarat administratif maupun persyaratan teknis, yaitu: 1) masih berstatus sebagai siswa SMP, 2) Warga Negara Indonesia, 3) berusia 14-15 tahun, 4) sehat jasmani-rokhani, 5) memiliki kecakapan bidang tertentu (OR, Seni), 6) memenuhi syarat administrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### 3) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

Proses pembelajaran akan lebih efektif apabila ditunjang dengan kondisi kesehatan siswa yang baik. Peningkatan kondisi kesehatan siswa dapat ditunjang melalui beberapa kegiatan antara lain melalui bidang olah raga. Kegiatan yang lebih mengarah pada proses pembelajaran telah dilaksanakan di sekolah-sekolah melalui program-program yang telah tertuang pada kurikulum mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesenian. Untuk menyemarakkan, memotivasi dan memberdayakan sekolah perlu didukung suatu wadah yang menampung kegiatan tersebut dalam bentuk pertandingan.

Untuk itu Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, memprogramkan kegiatan Porseni yang akan diselenggarakan secara bertahap dari sekolah hingga tingkat nasional.

Sasaran dari kegiatan Porseni SMP ini adalah siswa SMP-MTs negeri dan swasta termasuk SMP Terbuka.

Adapun cabang olah raga yang dilombakan pada Pekan Olahraga adalah: 1) Atletik, meliputi: lari 60 m, lompat jauh, lempar lembing, tolak peluru, 2) Renang, 3) Bola Voli, 4) Sepak Bola, 5) Tenis Meja, 6) Bulu tangkis, 7) Karate, 8) Pencak Silat, 9) Catur, 10) Tenis, 11) Bola Basket dan 12) Senam.

### 4) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

Seni dan sastra merupakan salah satu wahana bagi manusia untuk mengekspresikan dirinya. Pengusaan yang baik terhadap seni dan sastra dapat mendorong seseorang untuk lebih berkreasikan dalam mengaktualisasikan dirinya.

Salah satu upaya agar para siswa SMP memiliki kesempatan yang memadai dalam meningkatkan potensi dan kreativitasnya dalam bidang seni dan sastra, Direktorat Pembinaan SMP Ditjen

17	Kalimantan Barat	61.24	56.92	59.39	7,646
18	Kalimantan Tengah	72.54	68.47	71.75	4,875
19	Kalimantan Selatan	82.48	72.31	81.43	8,281
20	Kalimantan Timur	81.12	65.33	77.14	8,445
21	Sulawesi Utara	71.02	59.07	67.17	5,804
22	Gorontalo	72.77	69.82	72.57	2,434
23	Sulawesi Tengah	82.47	82.08	82.40	6,297
24	Sulawesi Selatan	79.56	67.96	76.80	20,104
25	Sulawesi Barat	80.62	64.12	77.42	2,091
26	Sulawesi Tenggara	81.26	76.28	80.92	5,834
27	Maluku	57.98	33.65	51.20	4,601
28	Maluku Utara	48.92	55.47	51.43	2,155
29	B a l i	60.33	74.30	65.77	7,406
30	NTB	75.49	77.58	75.73	9,171
31	NTT	52.69	69.28	59.20	8,105
32	Papua	65.29	74.96	68.05	4,509
33	Papua Barat	43.68	70.95	48.90	1,134
	<b>Indonesia</b>	<b>80.16</b>	<b>73.84</b>	<b>78.04</b>	<b>487,512</b>

Sumber : Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Depdiknas, 2007

Tabel tersebut menggambarkan bahwa secara nasional terdapat 78.04% guru SMP di Indonesia layak untuk mengajar. Beberapa provinsi yang perlu memperoleh prioritas perhatian untuk ditingkatkan kelayakannya adalah Papua Barat karena guru yang layak mengajar masih 48.90% atau sebanyak 1.134 orang.

Data tersebut menunjukkan masih perlu upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualifikasi guru SMP/MTs dengan mengikuti program kualifikasi yang tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di sekolah.

## 11. Kondisi Gedung Sekolah

Kondisi gedung sekolah dan ruang kelas dapat mempengaruhi peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Tabel 2.14 berikut menunjukkan kondisi ruang yang baik di tiap provinsi.

**Tabel 2.14 Kondisi Ruang Kelas yang Baik tiap Propinsi Tahun 2006/2007**

No.	Provinsi	Negeri	Swasta	Total	
		%	%	%	Jumlah
1	DKI Jakarta	82.70	91.09	87.26	6,463
2	Jawa Barat	79.89	81.74	80.50	24,087
3	Banten	78.28	70.57	74.84	6,161
4	Jawa Tengah	87.44	83.01	86.19	27,861
5	DI Yogyakarta	75.28	75.62	75.40	3,037
6	Jawa Timur	85.39	79.32	83.37	26,066
7	NAD	81.88	81.40	81.84	5,073
8	Sumatera Utara	62.83	78.84	69.21	12,604
9	Sumatera Barat	83.18	95.38	84.30	4,968
10	Riau	78.47	77.86	78.29	4,610
11	Kepulauan Riau	88.49	93.66	89.86	1,232
12	Jambi	80.30	86.26	81.02	2,642
13	Sumatera Selatan	80.56	80.14	80.46	8,358
14	Bangka Belitung	89.39	91.35	89.84	1,123
15	Bengkulu	84.80	84.24	84.77	2,499
16	Lampung	78.58	76.61	77.76	6,243
17	Kalimantan Barat	75.50	79.88	76.84	4,031
18	Kalimantan Tengah	77.84	78.90	78.01	2,015
19	Kalimantan Selatan	72.93	79.81	73.69	2,784
20	Kalimantan Timur	85.02	88.73	85.95	3,017
21	Sulawesi Utara	60.82	73.86	64.75	2,272
22	Gorontalo	83.96	77.27	83.57	1,282
23	Sulawesi Tengah	77.13	80.63	77.56	2,018
24	Sulawesi Selatan	80.21	68.12	78.35	7,450
25	Sulawesi Barat	77.55	79.55	77.97	1,012
26	Sulawesi Tenggara	67.48	73.75	67.82	2,046
27	Maluku	72.93	68.91	71.61	1,735
28	Maluku Utara	81.86	78.31	80.69	869
29	Bali	73.13	85.90	76.28	2,611
30	NTB	86.14	85.44	86.08	3,055

## Singapore-Indonesia Student Leaders' Adventure Camp

Berdasarkan nota kesepahaman ( MoU ) yang ditanda tangani pada tanggal 24 Juni 2005 di Singapura, antara Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Departemen Pendidikan Republik Singapura dibidang pendidikan telah dicapai kesepakatan Kerja sama meliputi, Kerja sama antar sekolah, pelatihan guru, pertukaran mahasiswa dan Kerja sama lainnya. Terkait dengan bidang Kerja sama antara sekolah kemitraan (partner schools), penyelenggaraan pertandingan olah raga persahabatan dan penyelenggaraan perkemahan untuk student leaders.

Untuk kegiatan perkemahan bagi student leaders ini, Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Republik Singapura dapat saling menyelenggarakan kegiatan ini secara bersamaan. Setiap perkemahan mengikutsertakan 100 orang siswa dari masing-masing Negara. Nama perkemahan ini adalah Singapore-Indonesia Student Leaders' Camp. Merupakan kesempatan yang baik untuk bertemu, berinteraksi, komunikasi, berbagi pengalaman dalam berbagai kegiatan hidup di alam terbuka, sehingga banyak kegiatan action di alam terbuka, petualangan dan penuh tantangan. Oleh karena itu peserta harus benar-benar mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental.

Dalam pelaksanaannya peserta juga harus dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan harus disiplin terhadap waktu. Kegiatan ini sudah diselenggarakan oleh Pemerintah Singapura sejak tahun 1990 yang berlangsung dua tahun sekali. Sekarang ini menjadi salah satu puncak kegiatan ekstrakurikuler, dan diselenggarakan setiap tahun.

Sejak tahun 2006 kegiatan ini statusnya meningkat menjadi kegiatan internasional karena pemerintah Singapura telah mengundang sejumlah siswa dari beberapa Negara Asia untuk bergabung.

Tujuan dari Singapore-Indonesia Student Leader's Adventure Camp adalah untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan siswa dalam percaturan antar bangsa, baik dalam berkomunikasi, tukar pengalaman berdasarkan kehidupan social masing-masing, serta memperoleh pengalaman secara nyata.

*Pembinaan tahap II* terhadap 9 (sembilan) siswa dilaksanakan secara intensif selama 5 (lima) bulan. Pembinaan tahap ini pendalaman materi sains dalam bentuk teori maupun praktik.

Pada setiap akhir pekan peserta dievaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian penguasaan materi. Proses pembinaan siswa dilakukan melalui kegiatan belajar di kelas, praktik di laboratorium dan pendampingan (tutorial) selama belajar mandiri di asrama.

### **International Science Project Olympiad (ISPO)**

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, Direktorat Pembinaan SMP melakukan fasilitasi pengembangan potensi siswa SMP baik bidang akademik maupun non akademik. Salah satu kegiatan yang dirancang dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan potensi siswa adalah dengan mengikuti kegiatan *International Science Project Olympiad (ISPO)*.

Untuk mempersiapkan keikutsertaan Indonesia dalam ajang olimpiade tersebut maka dilaksanakan kegiatan persiapan yang terdiri dari seleksi peserta dan pengiriman tim peserta *International Science Project Olympiad (ISPO)*.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan *International Science Project Olympiad (ISPO)* adalah untuk mendapatkan siswa terbaik yang benar-benar memenuhi persyaratan. Sedangkan tujuan pembinaan peserta ISPO adalah untuk mempersiapkan peserta yang akan mewakili Indonesia pada *International Science Project Olympiad (ISPO)*.

Sasaran program *International Science Project Olympiad (ISPO)* adalah siswa SMP-MTs peraih medali emas LPIR atau siswa yang telah lulus melalui seleksi khusus.

Kegiatan seleksi dilaksanakan berdasarkan hasil seleksi LPIR ditambah dengan seleksi tes khusus. Dari hasil seleksi dan tes tersebut akan dipilih 3 (tiga) peserta dengan nilai terbaik yang berhak mengikuti pembinaan dan menjadi tim Indonesia pada kegiatan *International Science Project Olympiad (ISPO)*.

Peserta diberangkatkan untuk mengikuti kegiatan *International Science Project Olympiad (ISPO)* selama 10 hari didampingi oleh tim pembina.

No.	Provinsi	Negeri	Swasta	Total	
		%	%	%	Jumlah
31	NTT	73.25	60.17	67.37	4,141
32	Papua	66.38	83.33	71.00	1,814
33	Papua Barat	70.48	70.59	70.49	442
	<b>Indonesia</b>	<b>79.74</b>	<b>79.49</b>	<b>79.66</b>	<b>185,621</b>

Sumber : Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Depdiknas, 2007

Data di atas menunjukkan bahwa kerusakan ruang kelas tingkat SMP sangat besar, yaitu mencapai 20.34% atau sekitar 47.395 dengan asumsi jumlah ruang seluruhnya adalah 233.016 ruang. Kerusakan ruang kelas tersebut berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan akhirnya berpengaruh pada mutu pendidikan. Oleh karena itu, dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu, kerusakan tersebut perlu diatasi, sehingga dapat memberikan kenyamanan belajar para siswa.

## **C. Tantangan**

### **1. Perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikan**

Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar yang pada tahun 2008 ini telah melebihi target pencapaian yaitu 96,18%, akan tetapi pemerintah masih dihadapkan pada sejumlah tantangan utama yaitu sebagai berikut.

- Masih ada 497.275 anak usia 13-15 tahun belum tertampung. Karena berbagai alasan, 497 ribu anak di berbagai daerah di Indonesia belum mendapatkan layanan pendidikan SMP atau yang sederajat.
- Masih terdapat 76 kabupaten yang mempunyai APK SMP/Sederajat dibawah 80% (Belum Tuntas)
 

Pada tahun 2008 APK SMP secara nasional telah mencapai 96,18%. Namun demikian, masih terdapat 76 kabupaten yang angka APK SMP-nya masih di bawah 80% atau baelum tuntas. Tanpa upaya yang khusus, kabupaten-kabupaten tersebut akan agak sulit mencapai APK di atas 80% pada tahun 2009/2010 karena berbagai alasan. Selain itu, juga angka absolut anak yang belum tertampung pada daerah padat penduduk masih cukup tinggi.
- Kondisi geografis yang sulit
 

Anak-anak usia 13-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan pada umumnya berdomisili di daerah yang terpencil, terisolir, dan terpencar-pencar dalam komunitas yang kecil-kecil. Kondisi geografis di mana mereka tinggal di daerah yang sedikit

populasinya inilah merupakan kendala dalam pengadaan layanan pendidikan bagi mereka.

d. Kemiskinan

Sebagai akibat dari krisis ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan penyesuaian harga BBM dan TDL, jumlah keluarga miskin di Indonesia pada tahun 2007 mencapai 16.5%. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya putus sekolah (angka putus sekolah SMP/MTs pada tahun 2007 sebesar 1.84%) dan ketidakmampuan orang tua menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

e. Kesenjangan budaya dan kesetaraan gender

Sebagian masyarakat masih ada yang memandang bahwa pendidikan kurang penting, termasuk masalah lain yaitu, misalnya kawin muda, dan kendala budaya lainnya. Walaupun perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan di SMP sudah berimbang dan cenderung perempuan lebih banyak, namun kondisi ini tetap masih ada hambatan pada kelompok masyarakat tertentu, sehingga anak perempuan lebih banyak dikorbankan untuk membantu orang tua di rumah.

f. Peran PEMDA dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun masih perlu ditingkatkan

Sebagian besar PEMDA kabupaten/kota dan provinsi belum melaksanakan kewajibannya dalam pembangunan pendidikan dengan baik. Sejumlah PEMDA kabupaten/kota dan provinsi bahkan terkesan mengabaikan sektor pendidikan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya alokasi APBD dan perhatian birokrat pada sektor pendidikan. Penyebab utama dari rendahnya partisipasi ini antara lain kurangnya pemahaman mereka akan tugas dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Disamping itu hal yang sangat menonjol adalah, terlalu seringnya pergantian pejabat di Dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi. Profesionalisme dan latar belakang pendidikan yang kurang menunjang dalam pelaksanaan tugas, sehingga menambah kompleksitas permasalahan pendidikan di era desentralisasi.

g. Sarana dan prasarana pendidikan masih perlu ditingkatkan

Pada daerah-daerah terpencil dan terisolir sarana/prasarana dan fasilitas pendidikan sangat terbatas. Gedung sekolah masih belum memadai atau bahkan belum ada, atau kalau pun sudah ada, belum didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai. Sebagai

bidang MIPA, maka kegiatan Olimpiade Sains Nasional secara terus menerus akan diselenggarakan.

Tujuan umum Olimpiade Sains adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa SMP di bidang MIPA baik dalam bentuk pemahaman maupun analisis dan praktik sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan

Peserta olimpiade sains nasional adalah siswa SMP/MTs yang memenuhi persyaratan, baik negeri maupun swasta dari seluruh Indonesia. Mata pelajaran yang dilombakan adalah Matematika, Biologi, Fisika, dan Astronomi.

## 2) Olimpiade Sains Internasional (IJSO), Olimpiade Matematika, *International Science Project Olympiad (ISPO)*, *Singapore-Indonesia Student Leaders' Adventure Camp tingkat SMP*

### IJSO

*International Junior Science Olympiad VI* tahun 2009 akan dilaksanakan pada bulan Desember 2009 di Azerbaijan. Untuk mempersiapkan calon peserta IJSO yang akan mewakili Indonesia maka di perlukan suatu mekanisme seleksi dan pembinaan siswa SMP untuk menjadi siswa terbaik dan mewakili Indonesia. Pada tahun ini mekanisme rekrutmen peserta IJSO dilakukan dengan dua cara yaitu melalui seleksi Olimpiade Sains Nasional dan seleksi siswa SMP berprestasi.

Tujuan seleksi adalah untuk mendapatkan siswa terbaik yang benar-benar memenuhi persyaratan. Sedangkan tujuan pembinaan peserta IJSO adalah untuk mempersiapkan peserta yang akan mewakili Indonesia pada IJSO ke-VI di Azerbaijan.

Sasaran pembinaan adalah 45 siswa untuk tahap pertama dan 9 (sembilan) siswa untuk tahap kedua.

*Pembinaan Tahap I* dilaksanakan terhadap 45 (empat puluh lima) siswa selama 1 bulan. Semua peserta mendapatkan materi teori maupun praktik. Pada setiap akhir pekan di evaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian atau penguasaan materi. Hasil evaluasi selama 4 (empat) pekan ini dijadikan dasar untuk menentukan 9 (sembilan) peserta yang berhak mengikuti pembinaan tahap berikutnya.

ruang belajar lain (RBL) meliputi perpustakaan atau pusat sumber belajar, laboratorium IPA, Laboratorium bahasa dan laboratorium komputer. Program ini diberikan dalam bentuk subsidi kepada sekolah yang bersangkutan dan pengelolaannya melibatkan partisipasi masyarakat.

Tujuan program pembangunan ruang perpustakaan ini adalah : 1) Meningkatkan mutu pendidikan SMP sehingga anak-anak dari seluruh lapisan masyarakat memiliki kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; 2) Memberikan rangsangan terhadap penyelenggaraan SMP guna memperkuat peran sertanya dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; 3) Mendorong terwujudnya penyelenggaraan SMP yang mandiri sehingga terwujud MPMB; 4) Mendorong anak-anak usia 13 – 15 tahun yang belum memperoleh kesempatan belajar untuk masuk sekolah sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi anak masuk sekolah.

Sasaran program ini adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dan swasta di seluruh Indonesia dengan prioritas pada SMP bertaraf internasional (SBI), SMP standar nasional (SSN).

### c. Olimpiade dan Kompetensi

#### 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat SMP

Sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya inovasi dan terobosan peningkatan mutu wajib belajar pendidikan dasar. Salah satu upaya tersebut adalah kegiatan lomba Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yang lebih dikenal dengan Olimpiade Sains Nasional (OSN).

Kegiatan lomba ini merupakan sarana dalam peningkatan mutu Wajib Dikdas dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, di samping merupakan ajang mencari bibit-bibit siswa berprestasi dalam bidang MIPA sebagai calon peserta olimpiade MIPA tingkat internasional.

Sehubungan itu Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan rencana program peningkatan mutu pendidikan dan dalam rangka menyiapkan siswa berbakat di

akibatnya sebagian anak usia sekolah terpaksa tidak memperoleh layanan pendidikan atau mendapatkan layanan pendidikan dengan kualitas yang minimal.

#### 2. Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan

Meskipun mutu SMP meningkat dari tahun ke tahun, masih banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi. Peningkatan mutu harus terus diupayakan dengan tantangan-tantangan utama sebagai berikut:

##### a. Mutu sebagian SMP masih rendah

Ditinjau dari nilai rata-rata UN, walaupun nilai rerata UN SMP nasional tahun 2007/2008 sebesar 6,87, masih ada 2.673 SMP (11,0%) yang pencapaiannya di bawah 5,5. Disamping masih ada sebanyak 7.104 sekolah (29,2%) yang masih mempunyai rata-rata UN dibawah 6,5.

##### b. Prestasi non-akademik masih belum memuaskan

Pencapaian non-akademik, misalnya dalam bidang olahraga dan seni masih belum bisa memberi kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan dan prestasi olahraga dan seni. Selain itu, kegiatan olahraga dan seni (misalnya PORSENI), belum dengan baik dikaitkan dengan pengembangan/pembinaan dalam bidang tersebut secara nasional oleh instansi/lembaga terkait, misalnya MENPORA dan instansi lain yang mengurus olahraga dan seni. Di samping itu, kualitas moral, kedisiplinan, kreativitas, kemandirian, kejujuran, ketabahan, kerja keras, dan jiwa sportif lulusan belum mengembirakan.

##### c. Angka mengulang kelas masih cukup tinggi

Rata-rata angka mengulang kelas secara nasional sudah cukup baik yaitu berkisar 0,42 % atau 36.437 dari populasi siswa, namun pada beberapa daerah masih cukup tinggi, yaitu sampai dengan 3,02 %.

##### d. Proses pembelajaran kurang optimal

Pembelajaran sebagian besar masih kurang bermakna bagi peserta didik. Selain itu, pembelajaran masih didominasi oleh guru melalui metode ceramah yang kurang melatih anak untuk berfikir kritis, kreatif, dan inovatif. Pendekatan pembelajaran yang pro-perubahan seperti misalnya pembelajaran kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*) dan inovasi lainnya diperlukan untuk menjalankan proses pembelajaran belum diterapkan dengan optimal.

e. Fasilitas pembelajaran belum memadai

Fasilitas pembelajaran yang penting seperti laboratorium IPA, perpustakaan, dan laboratorium bahasa masih sangat terbatas baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Dari segi jumlah, dari sekitar 24.293 SMP saat ini, 6.865 SMP (28.26%) belum memiliki laboratorium IPA, dan 8.908 SMP (36.67%) belum mempunyai perpustakaan. Dipandang dari sudut kualitas, fasilitas-fasilitas tersebut biasanya cukup memprihatinkan: sumber, bahan, dan alat pembelajaran yang tersedia sangat kurang memadai dengan pengelolaan/pemanfaatan yang tidak maksimal. Selain itu, sekitar 20.34% ruang kelas SMP di seluruh Indonesia memerlukan rehabilitasi agar tetap layak digunakan untuk proses pembelajaran.

### 3. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

Tata kelola dan akuntabilitas merupakan kelompok program ketiga yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan pemerataan akses dan peningkatan mutu. Beberapa hal yang masih perlu memperoleh perhatian bersama sebagai berikut.

a. Koordinasi dan sinkronisasi program masih belum berjalan dengan baik

Program-program penuntasan wajib belajar yang dirancang dan dilaksanakan oleh pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah harus dikoordinasikan dan disinkronkan agar terjalin sinergi dan kerjasama yang baik sehingga tujuan pembangunan pendidikan bisa tercapai dengan maksimal. Program-program pusat, daerah, dan sekolah harus saling mendukung, mengisi, dan melengkapi dengan acuan visi, misi, dan tujuan yang sama, yaitu tersedianya layanan pendidikan yang mudah dan bermutu bagi semua.

b. Kualitas pelaksanaan program belum optimal

Proses implementasi berbagai kegiatan baik oleh pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun sekolah masih belum memuaskan. Sejumlah kegiatan terkesan dilaksanakan sekedar memenuhi target realisasi program dengan kurang memperhatikan mutu. Bahkan sejumlah penyimpangan ditemukan di lapangan. Rendahnya mutu dan masih adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program bisa mengakibatkan tujuan program tidak tercapai. Bila demikian yang terjadi, pemborosan sumber daya yang ada dan terbatas saat ini akan hanya tersia-siakan.

### 3) Penyediaan Peralatan Laboratorium IPA SMP

Seiring dengan perluasan akses sebagai upaya penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, peningkatan mutu pendidikan perlu diupayakan secara optimal. Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMP dalam peningkatan mutu pendidikan adalah pemberian subsidi peralatan laboratorium IPA untuk SMP yang disalurkan langsung dari pemerintah pusat maupun yang dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi.

Subsidi peralatan laboratorium IPA diberikan kepada SMP yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi. Subsidi diberikan dalam bentuk dana kepada sekolah untuk mengadakan peralatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan dilaksanakannya program pemberian subsidi peralatan laboratorium IPA, adalah: menyediakan peralatan pendidikan bagi SMP untuk menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas; meningkatkan pencapaian kompetensi (prestasi) siswa; mendorong terwujudnya penyelenggaraan SMP yang mandiri berdasarkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); serta meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan nasional yang bermutu melalui pencapaian standar pelayanan minimal (SPM).

Subsidi peralatan laboratorium IPA tahun 2009 adalah untuk SMP negeri dan swasta dan diprioritaskan untuk rintisan SBI, SMP SSN, yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi.

### 4) Pembangunan Pusat Sumber Belajar SMP atau Perpustakaan

Diantara tantangan yang harus direspon Direktorat Pembinaan SMP dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar adalah kualitas pelayanan pendidikan dasar masih dirasakan rendah. Hal ini ditandai dengan belum idealnya perbandingan antara sekolah dengan laboratorium, dan ruang belajar lainnya (RBL) yang kurang layak.

Program yang dikembangkan Direktorat Pembinaan SMP untuk menjawab permasalahan di atas dalam rangka penuntasan Wajib Dikdas sembilan tahun yang bermutu adalah dengan membangun

berdasarkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); serta meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan nasional yang bermutu melalui pencapaian standar pelayanan minimal (SPM).

Subsidi peralatan pendidikan tahun 2009 adalah untuk SMP negeri dan swasta dan diprioritaskan untuk rintisan SBI, SMP SSN, yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi.

## 2) Subsidi Pembangunan Laboratorium IPA SMP

Diantara tantangan yang harus direspon Direktorat Pembinaan SMP dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar adalah kualitas pelayanan pendidikan dasar masih dirasakan rendah. Hal ini ditandai dengan belum idealnya perbandingan antara sekolah dengan laboratorium, dan ruang belajar lainnya (RBL) yang kurang layak.

Program yang dikembangkan Direktorat Pembinaan SMP untuk menjawab permasalahan di atas dalam rangka penuntasan Wajib Dikdas sembilan tahun yang bermutu adalah dengan membangun ruang belajar lain (RBL) meliputi perpustakaan atau pusat sumber belajar, laboratorium IPA, Laboratorium bahasa dan laboratorium komputer. Program ini diberikan dalam bentuk subsidi kepada sekolah yang bersangkutan dan pengelolaannya melibatkan partisipasi masyarakat.

Tujuan program pembangunan laboratorium IPA ini adalah: 1) Meningkatkan mutu pendidikan SMP sehingga anak-anak dari seluruh lapisan masyarakat memiliki kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; 2) Memberikan rangsangan terhadap penyelenggaraan SMP guna memperkuat peran sertanya dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; 3) Mendorong terwujudnya penyelenggaraan SMP yang mandiri sehingga terwujud MPMB; 4) Mendorong anak-anak usia 13 – 15 tahun yang belum memperoleh kesempatan belajar untuk masuk sekolah sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi anak masuk sekolah.

Sasaran program ini adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dan swasta di seluruh Indonesia dengan prioritas pada SMP bertaraf internasional (SBI), SMP standar nasional (SSN).

### c. Pelaksanaan MONEV belum optimal

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dari setiap pelaksanaan program. Melalui kegiatan ini pelaksanaan program dipantau dan dipastikan bahwa proses implementasi kegiatan berlangsung dengan baik dan tujuan dicapai dengan optimal. Namun demikian, walau pun dari tahun ke tahun desain MONEV (mekanisme dan instrumen) telah diperbaiki, pelaksanaan di lapangan belum berjalan dengan baik karena berbagai alasan, antara lain keterbatasan kemampuan petugas dan persepsi yang salah dari sebagian pihak yang memandang bahwa MONEV tidak penting, hanya merupakan pelengkap dari pelaksanaan program. Selain itu, hasil MONEV selama ini belum dianalisis, didokumentasikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk pengambilan kebijakan lanjutan dengan baik.

### d. Prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan yang berpihak pada rakyat belum dilaksanakan secara optimal

Pendidikan harus menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan bermacam-macam latar belakang secara adil dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan berbagai keputusan. Namun demikian hingga saat ini layanan pendidikan masih belum secara optimal menjangkau masyarakat golongan ekonomi lemah, daerah terpencil (pinggiran), dan anak-anak berkelainan atau dengan bakat khusus. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan masih cenderung terbatas pada penggalangan dana pendidikan. Masyarakat perlu diikutsertakan dalam bermacam-macam proses penyelenggaraan pendidikan sehingga pengelolaan pendidikan menjadi lebih transparan dan akuntabel.

### e. Manajemen data dan informasi yang lemah

Data kependidikan yang akurat/ terpercaya, lengkap, dan mutakhir sangat penting dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Sayangnya pada saat ini manajemen data dan informasi pendidikan pada setiap level masih lemah sehingga tidak dapat menyediakan data dengan baik. Keadaan ini diperburuk oleh keengganan PEMDA dalam menyediakan data. Sejumlah PEMDA bahkan menyediakan data yang "d disesuaikan dengan kebutuhan" – misalnya bila data yang diminta itu untuk keperluan subsidi ruang kelas baru, data dibuat seolah-olah kabupaten/kota yang bersangkutan kekurangan ruang kelas.

- f. Masih banyak sekolah, provinsi, dan PEMDA yang belum memiliki Renstra pengembangan pendidikan

Pengembangan pendidikan memerlukan perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang matang di semua tingkat, dari pusat hingga sekolah. Perencanaan yang baik dengan visi, misi, dan tujuan yang jelas memberi arah yang pasti bagi para pelaksana pembangunan. Sayangnya pada saat ini masih banyak sekolah, provinsi, dan kabupaten/kota yang belum memiliki Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), Rencana Pengembangan Pendidikan Kabupaten/Kota (RPPK), atau Rencana Pengembangan Pendidikan Provinsi (RPPP).

- g. Kapasitas Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota kurang memadai

Agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, instansi dan staf pada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memiliki kapasitas yang memadai. Pada saat ini sejumlah kantor dinas belum memiliki kemampuan secara memadai dilihat dari sudut pandang kelembagaan dan jumlah dan kompetensi personelnya. Dengan demikian, pengembangan kapasitas personel lembaga masih harus menjadi perhatian utama

- h. Implementasi manajemen berbasis sekolah belum optimal

Manajemen berbasis sekolah merupakan bentuk otonomi kepada sekolah, komite sekolah, dan masyarakat untuk mengelola sekolah menjadi lebih baik dan transparan. Otonomi ini belum dimanfaatkan sesuai dengan misi MBS-nya atau kadang malah kepala sekolah kehilangan eksistensinya.

### **Dutch Grant**

Pada tahun anggaran 2009, telah dilakukan upaya-upaya melalui berbagai program peningkatan akses dan mutu pendidikan. Di samping itu, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah ditekankan pula peran dinas pendidikan bersama masyarakat dalam rangka pengembangan pendidikan di kabupaten/kota, dan peran sekolah bersama masyarakat untuk mengembangkan sekolah dalam koridor School Based Management atau Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Salah satu upaya dalam mencapai sasaran tersebut, pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional melalui Kegiatan Bantuan Hibah Belanda (Dutch Grant) pada tahun 2009 akan melaksanakan sejumlah kegiatan peningkatan mutu dan akses terutama bagi anak-anak miskin di Propinsi Tenggara Timur (NTT) dalam kerangka otonomi pendidikan dasar. Adapun kabupaten/kota penerima dana bantuan Dutch Grant adalah: Lembata, Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, dan TTU.

## **b. Sarana Prasarana**

### **1) Pengadaan Alat Pendidikan**

Seiring dengan perluasan akses sebagai upaya penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, peningkatan mutu pendidikan perlu diupayakan secara optimal. Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMP dalam peningkatan mutu pendidikan adalah pemberian subsidi peralatan pendidikan untuk SMP yang disalurkan langsung dari pemerintah pusat maupun yang dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi.

Subsidi peralatan pendidikan diberikan kepada SMP yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi. Subsidi diberikan dalam bentuk dana kepada sekolah untuk mengadakan peralatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan dilaksanakannya program pemberian subsidi peralatan pendidikan, adalah: menyediakan peralatan pendidikan bagi SMP untuk menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas; meningkatkan pencapaian kompetensi (prestasi) siswa; mendorong terwujudnya penyelenggaraan SMP yang mandiri

mengelola bantuan internasional secara lebih terpadu sehingga dapat lebih efektif dalam pencapaian tujuan yang dikembangkan secara bersama, percepatan pengembalian, termasuk penanganan manajemen pendidikan yang tidak mengabaikan kualitas dan keberlanjutan.

Pemerintah Belanda, Komisi Eropa dan Bank Dunia secara bersama-sama menanggapi issue tersebut dan sebagai tahap awal mengembangkan Program Kapasitas Pendidikan Dasar dengan Dana Grant, dikenal dengan *Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF)* untuk mendukung salah satu agenda reformasi pendidikan di Indonesia. Program ini sekaligus bertujuan untuk mempersiapkan suatu wadah yang dapat menampung semua lembaga donor internasional dalam membantu pendidikan di Indonesia. Pemerintah Belanda dan Uni Eropa telah memberikan komitmen awal dengan menyediakan grant (trust fund) melalui BEC-TF berupa grant sejumlah €39 juta (sekitar US\$50 juta). Diharapkan donor internasional lain akan menyusul pada tahap selanjutnya. Trust fund ini diusulkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk mendukung Rencana Strategis Pendidikan Indonesia Tahun 2005-2009 serta memfasilitasi program-program kerjasama bilateral dan multilateral yang mendukung peningkatan pendidikan dasar.

Program BEC-TF ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah agar dapat menemukan suatu cara untuk meningkatkan pendidikan serta berusaha menempatkan peran dan tanggung jawabnya dalam konteks desentralisasi. Dalam hal ini, program dan kegiatan yang dikembangkan termasuk memperkuat, perencanaan, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia dan sistem monitoring dan evaluasi. Beberapa area yang akan dikembangkan melalui BEC-TF mencakup: (i) dialog dan analisis kebijakan, (ii) pengelolaan akuntabilitas dan manajemen keuangan, serta (iii) manajemen informasi.

Pengembangan BEC-TF juga dimaksudkan untuk mempersiapkan Sector Wide Approach (SWAp) yang akan diimplementasikan melalui System Improvement through Sector Wide Approach (SISWA) dengan dukungan dari Bank Dunia yang bekerjasama dengan antara lain dengan European Commission, Dutch, AusAID.

### BAB III

## KEBIJAKAN TEKNIS DAN STRATEGI

### A. KEBIJAKAN

Program-program Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama diarahkan untuk menyempurnakan penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun untuk kemudian meningkatkan mutu pendidikan. Program-program yang ada masih tetap harus dapat menjangkau anak-anak yang tinggal di daerah terpencil, anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak-anak di daerah konflik, daerah paska bencana, anak perempuan dan persamaan gender.

Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan teknis pembangunan pendidikan SMP Direktorat Pembinaan SMP dirumuskan sebagai berikut:

#### Kebijakan Umum

1. Menyempurnakan peningkatan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia 13-15 tahun, dengan target utama daerah dan masyarakat miskin, terpencil dan terisolasi. Penekanan ini diambil karena kecenderungan bahwa anak-anak yang belum memasuki pendidikan SMP pada umumnya disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga, alasan budaya dan atau bertempat tinggal di daerah terpencil, terpencar dan terisolir.
2. Upaya peningkatan akses kepada layanan pendidikan diupayakan bersamaan dengan peningkatan angka partisipasi anak perempuan, sehingga terwujud keseimbangan gender. Di daerah tertentu anak-anak perempuan masih terhambat oleh faktor adat istiadat dan budaya untuk dapat menyelesaikan Pendidikan Dasar 9 Tahun, sehingga perlu upaya khusus untuk mengatasinya.
3. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dilaksanakan bersama-sama dengan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dasar, sehingga tamatan mempunyai kompetensi dasar yang dapat digunakan untuk hidup dalam masyarakat dan atau melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Dengan demikian penuntasan wajib belajar tidak dapat dipisahkan dari peningkatan mutu pendidikan.
4. Meningkatkan efisiensi manajemen pendayagunaan sumberdaya pendidikan dan mengupayakan agar semua lembaga pendidikan dasar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien.

## Kebijakan Teknis

Tantangan dan masalah yang dihadapi serta memperhatikan kemampuan pemerintah pusat dan daerah, termasuk kemampuan dalam menggali potensi masyarakat, maka kebijakan, strategi dan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 dititikberatkan pada kemajuan kita untuk menjawab permasalahan akses, mutu, dan tata kelola yang baik.

### 1. Perluasan dan pemerataan pendidikan

- a. Memperluas dan meratakan layanan pendidikan bagi anak-anak usia 13-15 tahun terutama di daerah terpencil, terisolir, di daerah yang terpencar-pencar, serta bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus dengan tidak membedakan jenis kelamin maupun golongan melalui penyediaan pendidikan SMP reguler maupun alternatif.
- b. Memberikan perhatian khusus kepada kabupaten atau daerah-daerah kantong APK SMP rendah, terutama yang masih di bawah 80%. Perhatian khusus itu antara lain dalam bentuk pembinaan, pemberian bantuan teknis, subsidi penuntasan wajib belajar, dan sosialisasi wajib belajar.
- c. Menyediakan subsidi kepada sekolah maupun murid untuk operasional sekolah dan keperluan siswa lainnya agar siswa dapat melanjutkan dan menamatkan pendidikan SMP mereka tanpa terkendala oleh masalah ekonomi.
- d. Melakukan sosialisasi penuntasan wajib belajar melalui berbagai cara kepada berbagai pihak, terutama masyarakat yang masih belum menyadari akan pentingnya pendidikan bagi semua tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, dan tempat tinggal. Selain menyadarkan akan pentingnya pendidikan, sosialisasi penuntasan wajib belajar ditujukan kepada penggalangan partisipasi masyarakat dalam arti luas.
- e. Melakukan sosialisasi/kampanye kepada PEMDA, terutama yang perhatian terhadap pembangunannya masih tergolong rendah. Dengan kebijakan ini diharapkan PEMDA yang bersangkutan memberikan perhatian yang lebih baik kepada pendidikan, antara lain dengan meningkatkan alokasi pembangunan pendidikan dalam APBD secara signifikan. Sesuai dengan UU no. 32 Tahun 2004.
- f. Memperhatikan Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Akselerasi Penuntasan Wajib 9 Tahun, dan Permendiknas No 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2006, maka perlu dilakukan upaya-upaya secara kolektif yaitu dengan menggalang

atau kegiatan sosial (misalnya kepramukaan, lingkungan hidup) serta pemenang lomba O2SN dan FLS2N Tingkat Provinsi tahun 2009 yang secara otomatis ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa Bakat dan Prestasi.

### 14) Beasiswa SMP Terbuka

SMP Terbuka sebagai salah satu alternatif penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu diharapkan mampu menampung tamatan SD/MI/setara, yang karena kendala sosial ekonomi, kondisi geografis, transportasi dan kendala waktu, tidak dapat mengikuti pendidikan di SMP reguler.

Para siswa SMP Terbuka yang pada umumnya tergolong du'afa diharapkan dapat menyelesaikan pendidikannya. Untuk itu, semua siswa yang terdaftar dapat diusulkan untuk mendapatkan beasiswa.

Sasaran pemberian beasiswa ini adalah siswa SMP Terbuka yang tidak mampu secara ekonomi.

### 15) BEC (*Basic Education Capacity*) PHLN dan SDF (*Dutch*)

#### **BEC (*Basic Education Capacity*)**

Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama telah menyusun Rencana Strategis Pendidikan Jangka Menengah yang mencakup semua sektor dan tingkat pendidikan dengan fokus pada 3 (tiga) prioritas pendidikan dasar yaitu (i) peningkatan layanan pendidikan dasar yang bermutu, (ii) peningkatan kualitas pendidikan dasar, serta (iii) peningkatan efektivitas manajemen pendidikan dasar dalam konteks desentralisasi.

Pemerintah Indonesia memandang perlunya mengembangkan suatu wadah yang dapat menampung semua lembaga donor pendidikan atau dikenal dengan *Sector Wide Approach (SWAp)*. Melalui wadah *SWAp*, Pemerintah diharapkan mampu mengelola secara lebih efektif dan efisien investasi di sektor pendidikan yang datang dari lembaga donor yang membantu Indonesia dalam mencapai prioritas program pembangunan di bidang pendidikan. Sampai saat ini bantuan dari pihak donor terlaksana secara terpisah-pisah dan seakan-akan tidak ada koordinasi sehingga seolah-olah intervensi yang dikembangkan oleh masing-masing program (baca: proyek) tidak memiliki dampak nyata dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Selain dari itu muncul pula kesadaran untuk menemukan suatu strategi yang dapat

instrumen supervisi klinis dan evaluasi pelaksanaan KTSP serta menganalisis hasil evaluasi.

- k. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta dalam meningkatkan profesionalisme mereka secara berkelanjutan.

### 13) Beasiswa Bakat Prestasi

Diantara kebijakan pemerintah untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun adalah peningkatan Keluasan dan Kemerataan Akses mendapatkan pendidikan. Hal itu dapat dilaksanakan melalui beberapa program, antara lain pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Selain peningkatan akses, kebijakan pembangunan pendidikan juga bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan. Beberapa upaya yang telah dilakukan adalah dengan mengadakan berbagai lomba kejuaraan tingkat nasional, regional dan internasional, baik dalam bidang akademik maupun non akademik seperti olahraga, seni dan kegiatan sosial. Dalam rangka memberikan motivasi yang lebih tinggi kepada para siswa agar dapat meningkatkan prestasi, pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama memprogramkan beasiswa Bakat dan Prestasi bagi siswa yang memiliki prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik.

Maksud dari program beasiswa Bakat dan Prestasi tersebut adalah memberikan beasiswa kepada siswa Sekolah Menengah Pertama, baik negeri maupun swasta, yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik.

Tujuan dilaksanakannya program pemberian beasiswa Bakat dan Prestasi ini adalah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa yang berprestasi dalam bidang akademik, diutamakan orang tuanya mengalami hambatan ekonomi, sehingga dikhawatirkan siswa tersebut tidak dapat mempertahankan prestasi akademiknya atau bahkan akan putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya dan memberikan bantuan kepada siswa yang berprestasi dalam bidang non akademik (olahraga, kesenian dan kegiatan sosial), sehingga dapat lebih mengembangkan bakat yang dimilikinya.

Sasaran penyaluran beasiswa Bakat dan Prestasi ini adalah siswa kelas 2 dan 3 yang berprestasi di bidang akademis atau siswa kelas 1, 2, dan 3 yang memiliki bakat dalam bidang olahraga, kesenian,

kerjasama dan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan industri (termasuk mass media), organisasi massa, LSM, ulama, tokoh masyarakat, dan perguruan tinggi dalam menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu tinggi.

## 2. Mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan

- a. Memberikan pelayanan berupa pendidikan gratis bagi siswa SMP. Pada tahun 2009 semua SMP Negeri (kecuali SMP Bertaraf Internasional/SBI dan Rintisan SMP Bertaraf Internasional/RSBI) tidak boleh meminta dana dari orang tua siswa untuk membiayai biaya operasional di sekolah. Sedangkan untuk SMP Swasta agar mengurangi besarnya dana yang diambil dari orang tua siswa. Untuk mendukung kebijakan ini diperlukan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk membiayai kebutuhan pendidikan lainnya selain biaya operasional sekolah. Dukungan Pemda juga diperlukan dalam pengawasan dan pengaturan besarnya dana yang diambil dari masyarakat terutama oleh Sekolah Swasta agar tidak memberatkan orang tua siswa.
- b. Meningkatkan mutu pembelajaran berdasarkan ICT pada SMP Terbuka. Juga pengembangan CTL berbasis ICT untuk sekolah SSN, RSBI dan SBI.
- c. Dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang kebijakan pendidikan di tingkat pusat, maka dilakukan pengurangan terhadap petunjuk pelaksanaan (konsep), tetapi meningkatkan pemberian contoh-contoh yang baik (*best practices*) dalam pelaksanaan semua program pada umumnya dan program peningkatan mutu pada khususnya agar dapat dijadikan contoh nyata bagi sekolah.
- d. Melakukan upaya-upaya perbaikan mutu pendidikan melalui peningkatan prestasi akademik maupun non-akademik, yang dilakukan melalui perbaikan masukan instrumental dan proses pendidikannya.
- e. Menurunkan angka mengulang kelas melalui berbagai upaya inovatif, seperti penyusunan bahan ajar yang menarik, media pendidikan yang bervariasi, dan upaya-upaya lain yang mampu menumbuhkan motivasi belajar siswa.
- f. Mengembangkan dan mengimplementasikan model-model pembelajaran yang bersifat inovatif, menyenangkan, dan bermakna yang berorientasi pada kebutuhan belajar siswa dan pembelajaran. Pembelajaran yang dimaksud harus mengembangkan daya pikir yang kreatif, inovatif, eksperimentatif, dan yang mampu menggugah daya

kalbunya sehingga anak-anak didik menjadi lebih kritis, mandiri, disiplin, kerja keras, jujur, dan daya juang yang tinggi dalam menempuh kehidupan yang lebih baik.

- g. Merehabilitasi sarana/prasarana dan memenuhi fasilitas pembelajaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan KTSP.
- h. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan kemampuan sekolah dalam melaksanakan KTSP.

### 3. Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik

- a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah dalam perencanaan, implementasi, evaluasi dan tindak lanjut program.
- b. Meningkatkan kapasitas institusi dan staf/pengelola program di provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah.
- c. Melakukan sosialisasi dan publikasi secara menyeluruh tentang pedoman-pedoman pembinaan SMP.
- d. Meningkatkan mutu pelaksanaan MONEV dan memanfaatkan hasil-hasil MONEV.
- e. Mengedepankan pengelolaan pendidikan yang berpihak pada rakyat.
- f. Meningkatkan mutu manajemen data dan informasi pendidikan baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun sekolah.
- g. Meningkatkan mutu pembangunan pendidikan melalui penyusunan rencana pembangunan yang komprehensif dan terarah yang sinkron dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga sekolah.
- h. Meningkatkan efisiensi manajemen pendayagunaan sumberdaya pendidikan dan mengupayakan agar semua lembaga pendidikan dasar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
- i. Mengupayakan administrasi dan pengelolaan yang tangguh, baik administrasi umum, pengelolaan program perluasan, maupun pengelolaan program peningkatan mutu SMP.

## B. STRATEGI

Memperhatikan tantangan dan masalah yang dihadapi dan kebijakan yang ditetapkan, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam membangun pendidikan SMP, menetapkan strategi dengan menetapkan target-target yang akan dicapai melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2009. Target-target tersebut meliputi tiga komponen, yaitu perluasan dan

- c. pengetahuan dan keterampilan dalam operasionalisasi model-model pembelajaran yang inovatif, terutama pembelajaran kontekstual di dalam kelas, dan
- d. pengetahuan mengenai Permendiknas tentang sarana/prasarana pendidikan, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pengelolaan pendidikan.

Oleh karena itu, kegiatan bimbingan teknis lanjutan bagi TPK Kabupaten/kota sangat diperlukan untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut di atas sekaligus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan lainnya yang dibutuhkan agar TPK kabupaten/kota dapat melaksanakan fungsi atau tugas-tugasnya dengan optimal.

### Tujuan

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan TPK kabupaten/kota dalam merancang sosialisasi/pelatihan dan pendampingan teknis implementasi SI, SKL, KTSP, dll.
- b. Meningkatkan pengetahuan TPK kabupaten/kota mengenai standar nasional pendidikan tentang sarana/prasarana, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, dan proses.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan TPK kabupaten/kota dalam melakukan analisis situasi pendidikan sekolah dalam rangka pengembangan dan verifikasi KTSP.
- d. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan TPK kabupaten/ kota dalam mengembangkan bahan ajar sesuai dengan KTSP.
- e. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan TPK kabupaten/ kota dalam mengembangkan media pembelajaran.
- f. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan TPK kabupaten/kota dalam mengembangkan penilaian berbasis kelas.
- g. Strategi peningkatan angka kelulusan dan nilai rata-rata UN.
- h. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam mengembangkan pembelajaran kontekstual – termasuk mengajar di kelas.
- i. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan TPK kabupaten/kota dalam melaksanakan bimbingan dan konseling dalam pembelajaran.
- j. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan TPK kabupaten/ kota dalam mengembangkan dan merancang

pendampingan implementasi SI dan SKL di seluruh kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Selanjutnya menindaklanjuti Surat Edaran Mendikdas nomor 33 tahun 2007, Direktorat PSMP telah melakukan workshop ToT bimbingan teknis KTSP bagi Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, 11 anggota tim dari masing-masing kabupaten/kota. TPK Kabupaten/Kota tersebut bertugas melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis pengembangan dan pelaksanaan KTSP, serta verifikasi KTSP di seluruh SMP di kabupaten/kota yang bersangkutan. Dengan dilaksanakannya workshop bagi TPK Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut diharapkan sosialisasi, pelatihan, pendampingan teknis pengembangan dan implementasi KTSP, serta verifikasi KTSP di seluruh wilayah Indonesia dapat dilaksanakan dengan cepat dan semua sekolah dapat mengimplimentasikan SI dan SKL selambat-lambatnya pada tahun pelajaran 2009/2010.

Namun demikian, hasil monitoring dan evaluasi terhadap kinerja TPK Provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan bahwa proses sosialisasi/pelatihan dan pendampingan pengembangan dan implementasi KTSP, serta verifikasi KTSP belum maksimal karena berbagai alasan. Pengembangan dan pelaksanaan KTSP di sekolah-sekolah pelaksana belum optimal dan masih memerlukan pendampingan dalam rangka pembinaan, terutama terkait dengan kegiatan operasional silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di kelas. Umumnya sekolah masih pada tahap mengadaptasi dan mengadopsi model-model yang sudah ada, walaupun sekolah-sekolah yang dipantau merupakan sekolah dengan kategori Sekolah Standar Nasional (SSN).

Di antara alasan-alasan kinerja TPK Provinsi, Kabupaten/kota adalah belum maksimalnya:

- a. pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melakukan analisis situasi sekolah dalam rangka pengembangan dan verifikasi KTSP,
- b. pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengoperasionalkan silabus ke dalam RPP dan merealisasikannya ke dalam bahan ajar,

pemerataan kesempatan belajar, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan peningkatan *governance*, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

### 1. Perluasan dan pemerataan kesempatan belajar

Target yang hendak dicapai melalui program perluasan dan pemerataan kesempatan belajar adalah meningkatkan APK SMP dari 96,18 pada tahun 2008 menjadi 98,54% pada tahun 2009. Kenaikan APK sebesar 2,36% tersebut akan dicapai dengan menyediakan tambahan layanan pendidikan bagi 495.860 anak usia SMP.

Target tersebut akan dicapai melalui program-program berikut:

- a. Pembangunan Unit Sekolah Baru pada daerah-daerah dengan APK rendah dan daerah-daerah yang angka absolut anak yang tidak melanjutkan masih sangat tinggi.
- b. Penambahan RKB pada SMP yang masih memungkinkan untuk penambahan daya tampung baru baik negeri maupun swasta.
- c. Pengembangan SD-SMP Satu Atap pada daerah terpencil, terpencar, terisolir, dan daerah yang mempunyai kesulitan khusus dengan menambah sarana/prasarana pada SD negeri yang sudah ada.
- d. Peningkatan daya tampung SMP Terbuka sehingga pengelolaannya lebih efisien.
- e. Penggalangan kerjasama dengan perguruan tinggi dan instansi lain dalam meningkatkan perannya dalam penuntasan wajar 9 tahun
- f. Pemberian subsidi kepada siswa agar melanjutkan sekolah ke jenjang SMP, tetap dapat bersekolah hingga tamat, dan kepada mereka yang sudah putus sekolah agar kembali ke sekolah.
- g. Program BOS yang diharapkan dapat meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan dengan peningkatan daya tampung.
- h. Peningkatan kesadaran dan peran PEMDA dan masyarakat dalam memberikan layanan anak usia 13-15 tahun dalam memperoleh pendidikan di SMP.

### 2. Mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan

Target yang hendak dicapai dalam hal mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan berdasarkan nilai UN adalah peningkatan jumlah SMP dengan kategori A : Sangat Baik ( $> 7,5$ ), B : Baik ( $7,49 - 6,5$ ), dan C : Cukup ( $6,49 - 5,5$ ), hingga jumlah SMP yang berkategori D: Kurang ( $5,49 - 4,5$ ) dan E: Kurang Sekali ( $4,49 - 3,5$ ). Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dan mutu sarana/prasarana dan fasilitas pembelajaran

ditingkatkan agar proses pembelajaran lebih efektif dan efisien. Selain itu relevansi pendidikan dengan tuntutan dunia kerja dibenahi sehingga lulusan lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja.

Untuk mencapai target-target tersebut, sejumlah program telah dirancang, yaitu:

- a. Memberikan subsidi untuk pembinaan SBI SMP
- b. Memberikan subsidi untuk pembinaan SSN SMP
- c. Memberikan subsidi Pembinaan Kompetensi Siswa
- d. Memberikan Subsidi Keterampilan SMP Terbuka
- e. Mengembangkan materi best practice
- f. Pengembangan Bahan Ajar CTL (TIK, Seni Budaya dan Keterampilan)
- g. Penyusunan Bank Soal Evaluasi Hasil Belajar MIPA Bilingual
- h. Pengembangan Materi IPA dan IPS Terpadu
- i. Bintek Pembelajaran IPA dan IPS Terpadu
- j. Pengembangan dan pengadaan bahan ajar multimedia interaktif
- k. Pengembangan Bahan Ajar RSBI
- l. Bintek Pembelajaran MIPA Bilingual
- m. Pendidikan dan Pelatihan KTSP
- n. Beasiswa Bakat Prestasi
- o. Beasiswa SMP Terbuka
- p. BEC (Basic Education Capacity) PHLN & SDF (Dutch)
- q. Pengadaan Alat Pendidikan
- r. Subsidi Pembangunan Lab IPA
- s. Penyediaan Peralatan Lab IPA
- t. Pengembangan Pusat Sumber Belajar SMP/Perpustakaan
- u. Kegiatan kesiswaan yang meliputi :
  - 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN)
  - 2) Olimpiade Sains Internasional (IJSO), IAO, ISPO
  - 3) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
  - 4) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
  - 5) Lomba LPIR/Cipta Puisi dan Lagu
  - 6) Pelaksanaan Lomajari Tingkat Nasional
  - 7) Seleksi Lomba-lomba tingkat provinsi dan kabupaten
- v. Subsidi TIK
- w. Multimedia Interaktif untuk 7 mapel
- x. Workshop provinsi dalam rangka perencanaan wajar
- y. Koordinasi tingkat provinsi dan kabupaten
- z. Pemberian penghargaan Widyakrama
- ā. Pembinaan SMP Berbasis Masyarakat (REDIP-G)
- ä. Pembinaan SMP Terbuka

- c) Meningkatkan kemahiran berbahasa Inggris guru MIPA dan bahasa Inggris dalam MIPA.
- d) Meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan ICT dalam pembelajaran.
- e) Mengembangkan perangkat pembelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam dalam bahasa Inggris untuk kelas VII dan VIII yang dilengkapi dengan media presentasi (guru MIPA).
- f) Menyajikan pembelajaran yang berpusat pada siswa, efektif, efisien, kontekstual, dan menyenangkan dengan memanfaatkan ICT dengan pengantar bahasa Inggris.
- g) Mengembangkan team-teaching.
- h) Menerapkan penilaian berbasis kelas.
- i) Meningkatkan kemampuan guru TIK dalam pembelajaran dan pengembangan manajemen/administrasi berbasis teknologi komunikasi dan informasi.
- j) Pembekalan kepada para peserta yang terpilih untuk mengikuti program pelatihan di RECSAM bagi peserta dari RSBI tahun 2008.

Sasaran Bintek pembelajar MIPA Bilingual adalah 200 SMP SBI, masing-masing sekolah sebanyak 5 (lima) peserta yaitu guru matematika, fisika, biologi, bahasa Inggris dan TIK / PTD masing-masing 1 (satu) orang guru.

## 12) Bimbingan Teknis Pengembangan KTSP – Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten/ Kota

### Latar Belakang

Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada tingkat SMP di seluruh Indonesia, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (Dit. PSMP) pada tahun anggaran 2006 telah melaksanakan workshop implementasi SI dan SKL atau KTSP bagi Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Provinsi untuk seluruh Indonesia, 22 anggota tim dari masing-masing provinsi dan dilanjutkan kembali dengan Bimtek Tim Pengembang Kurikulum / Verifikator KTSP provinsi pada tahun 2008 dengan masing-masing 11 orang TPK Provinsi. Diharapkan TPK Provinsi setelah mengikuti workshop tersebut mampu melaksanakan tugas-tugas sosialisasi, pelatihan, dan

## Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah:

- Bahan ajar mata pelajaran TIK/PTD dalam bahasa Inggris,
- Bahan ajar mata pelajaran Bahasa Inggris berdasarkan SI dan SKL RSBI, dan
- Bahan ajar mata pelajaran IPS berdasarkan SI dan SKL Permen Diknas nomor 22 dan 23 tahun 2006.

## Tujuan

Menyusun bahan ajar untuk RSBI untuk mata pelajaran Bahasa Inggris, TIK/PTD, dan IPS yang memenuhi persyaratan kelayakan bahan ajar sebagaimana ditetapkan oleh BSNP dan mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran.

### 11) Bintek Pembelajaran bagi Guru RSBI

UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 50 ayat 3 yang menyatakan bahwa “pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”. Depdiknas melalui Direktorat Pembinaan SMP telah mulai merintis pengembangan SMP bertaraf internasional dengan melaksanakan pembelajaran MIPA dalam bahasa Inggris secara terbatas.

Salah satu ciri SMP bertaraf Internasional adalah diimplementasikannya pembelajaran MIPA dalam bahasa Inggris. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh sekolah dalam mengimplementasikan pembelajaran MIPA dalam bahasa Inggris adalah terbatasnya kemampuan guru MIPA dalam mengajar menggunakan pengantar bahasa Inggris. Guru-guru MIPA pada umumnya belum memiliki kompetensi yang memadai dalam mengembangkan pembelajaran MIPA dalam bahasa Inggris. Untuk itu perlu diselenggarakan workshop bimbingan teknis pembelajaran bagi guru MIPA dalam bahasa Inggris.

Tujuan dilaksanakannya bimbingan teknis Pembelajaran MIPA dalam Bahasa Inggris adalah:

- Mengidentifikasi unsur-unsur X (tambahan) pada SI dan SKL SBI.
- Menyusun KTSP SBI (termasuk silabus dan RPP).

### 3. Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik

Tujuan program-program perluasan dan pemerataan layanan pendidikan dan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan akan tercapai dengan baik apabila dibarengi dengan peningkatan mutu tata kelola, akuntabilitas, pencitraan publik penyelenggaraan pendidikan. Melalui penerapan dan pengembangan manajemen sumber daya pendidikan yang tepat baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah, program-program pembagunan pendidikan akan berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem pengelolaan pendidikan dengan ditunjang oleh sumber daya manusia yang handal.

Pada tahun 2008 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama akan meneruskan dan mengembangkan lebih lanjut program tahun 2007 yang meliputi: (a) pengembangan Sistem Informasi Manajemen yang difokuskan pada pengembangan aplikasi untuk meningkatkan mutu manajemen di sekolah yaitu Paket Aplikasi Sekolah (PAS) SMP, (b) sosialisasi dan publikasi berbagai pedoman SMP dan BOS, (c) pengembangan kapasitas baik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun sekolah, (d) monitoring dan evaluasi, baik yang dilakukan secara internal maupun independen, dan (e) memperkuat administrasi dan pengelolaan secara umum dan pengelolaan program-program secara khusus yakni program peningkatan pemerataan/ perluasan dan peningkatan mutu.

Sasaran dari pengembangan multimedia pembelajaran interaktif adalah materi-materi (kompetensi dasar-kompetensi dasar) esensial untuk mata pelajaran matematika kelas IX (4 materi esensial). Selain itu juga dikembangkan multimedia interaktif untuk satu materi esensial PKn dan satu materi esensial Agama.

## **10) Pengembangan Bahan Ajar RSBI**

### **Latar Belakang**

Sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu, daya saing, dan relevansi lulusan SMP, sejak tahun 2007/2008 Direktorat PSMP telah mengembangkan Sekolah Bertaraf Internasional dengan ditetapkannya sejumlah Rintisan SMP Bertaraf Internasional (RSBI). Hingga tahun 2009, telah ditetapkan 302 RSBI yang tersebar di seluruh Indonesia. Ke depan, di setiap kabupaten/kota setidak-tidaknya harus ada satu Rintisan SMP Bertaraf Internasional.

Salah satu ciri RSBI adalah diselenggarakannya pembelajaran MIPA dalam bahasa Inggris dan pembelajaran bahasa Inggris dengan SK/KD yang diperkaya untuk mendukung pembelajaran MIPA dalam bahasa Inggris. Untuk membantu sekolah melaksanakan pembelajaran tersebut, Direktorat PSMP telah menyusun bahan ajar, VCD model pembelajaran, multimedia interaktif, materi belajar mandiri bahasa Inggris untuk guru IPA, dan bantuan teknis lainnya. Selain itu, telah dikembangkan bahan ajar Bahasa Inggris sesuai dengan SK/KD dan SKL RSBI. Namun demikian, bahan ajar tersebut dipandang belum dapat mendukung pembelajaran MIPA dalam bahasa Inggris dengan baik, dan oleh karenanya perlu dikembangkan bahan ajar bahasa Inggris yang lebih sesuai.

Dalam perkembangannya, Direktorat PSMP dengan memperhatikan masukan dari sekolah, masyarakat, dan pakar pendidikan, memandang perlu untuk memperluas pembelajaran dengan pengantar bahasa Inggris ke mata pelajaran-mata pelajaran lainnya, yaitu TIK/PTD dan IPS. Sehubungan dengan hal tersebut, mulai tahun pelajaran 2010/2011 ditargetkan semua RSBI telah melaksanakan pembelajaran TIK/PTD dan IPS dalam bahasa Inggris. Untuk mendukung target tersebut, perlu dikembangkan bahan ajar dalam bahasa Inggris untuk kedua mata pelajaran tersebut.

## 9) Pengembangan dan Pengadaan Bahan Ajar Multimedia Interaktif

Sejak tahun 2004/2005, dalam rangka peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, Direktorat Pembinaan SMP telah mengembangkan pembelajaran MIPA dalam bahasa Inggris. Pada awalnya, pembelajaran ini diimplementasikan pada 34 SMP Koalisi di seluruh Indonesia. Pada 2009, implementasinya sudah diperluas menjadi 300 SMP RSBI. Pada tahun-tahun mendatang, seiring dengan bertambahnya jumlah Rintisan SMP bertaraf internasional, implementasi pembelajaran MIPA bahasa Inggris akan semakin meluas. Untuk mendukung implementasi program tersebut, Direktorat PSMP telah mengembangkan bahan ajar MIPA dalam bahasa Inggris sesuai dengan standar isi yang telah diperkaya.

Memenuhi tuntutan pasal 19 PP nomor 19 tahun 2005, proses pembelajaran di SMP bertaraf internasional diupayakan berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang berlangsungnya pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Melalui monitoring dan evaluasi dan supervisi klinis ke sekolah-sekolah pelaksana pembelajaran MIPA bahasa Inggris ditemukan bahwa banyak guru yang mengalami kesulitan untuk memfasilitasi siswa-siswanya mempelajari/ menguasai materi atau kompetensi-kompetensi yang sulit dan/atau abstrak. Salah satu solusi yang dipandang efektif dan efisien adalah dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif dalam proses belajar mengajar. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan multimedia pembelajaran interaktif.

Tujuan pengembangan multimedia pembelajaran yang interaktif adalah untuk mendukung penciptaan pembelajaran dalam bahasa Inggris yang inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik untuk kompetensi dasar-kompetensi dasar esensial mata pelajaran Matematika dan IPA.

## BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

### A. PROGRAM

Dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan dan dalam upaya mencapai visi dan misi Direktorat Pembinaan SMP, maka telah dipersiapkan program yang tercakup didalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2009. Program-program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMP pada tahun 2009 terdiri dari: a) Perluasan dan Pemerataan Akses, b) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing, c) Penguatan Tata Kelola dan Pencitraan Publik. Pengelola kegiatan masing-masing program berikut ini disesuaikan dengan urutan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Depdiknas yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan dan skema DPR yaitu :

Program/kegiatan	Pengelola	Nama Satuan Kegiatan di Pusat
<b>I. Perluasan dan Pemerataan Akses</b>		
<b>A. Pendanaan</b>		
1. Penyediaan Beasiswa bagi siswa miskin	Dekonsentrasi	
2. Melanjutkan Penyediaan BOS SMP	Dekonsentrasi	
<b>B. Sarana Prasarana</b>		
1. Subsidi Pembangunan USB	Pusat	Keg. Perluasan SMP
2. Subsidi Pembangunan SD-SMP Satu Atap	Pusat dan Dekonsentrasi	Keg. Perluasan SMP
3. Subsidi Pembangunan RKB	Pusat	Keg. Perluasan SMP
4. Rehabilitasi Ruang	Pusat	Keg. Perluasan SMP
<b>II. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing</b>		
<b>A. Pendanaan</b>		
1. SBI SMP	Pusat	Keg. SSN dan SBI
2. SSN SMP	Pusat	Keg. SSN dan SBI
3. Bintek Pembinaan Kompetensi Siswa	Pusat	Keg. Sos. Wajar dan Pengendalian Prog
4. Subsidi Keterampilan SMP Terbuka	Pusat	Keg. SMPT dan Pendidikan Alternatif
5. Pengembangan Materi Best Practice	Pusat	Keg. Mutu dan Pembelajaran
6. Pengembangan Bahan Ajar CTL (TIK, Seni Budaya dan Ketrampilan)	Pusat	Keg. Mutu dan Pembelajaran
7. Penyusunan Bank Soal Evaluasi Hasil Belajar MIPA Bilingual	Pusat	Keg. Mutu dan Pembelajaran
8. Pengembangan Materi IPA dan IPS Terpadu	Pusat	Keg. Mutu dan Pembelajaran
9. Bintek Pembelajaran IPA dan IPS Terpadu	Pusat	Keg. Mutu dan Pembelajaran
10. Pengembangan dan pengadaan bahan ajar multimedia interaktif	Pusat	Keg. Mutu dan Pembelajaran
11. Pengembangan Bahan Ajar RSBI	Pusat	Keg. Mutu dan Pembelajaran
12. Bintek Pembelajaran MIPA Bilingual	Pusat	Keg. Mutu dan Pembelajaran
13. Pendidikan dan Pelatihan KTSP	Pusat	Keg. Mutu dan Pembelajaran
14. Beasiswa Bakat Prestasi	Dekonsentrasi	

Pogram/kegiatan	Pengelola	Nama Satuan Kegiatan di Pusat
15. Beasiswa SMP Terbuka 16. BEC (Basic Education Capacity) PHLN & SDF (Dutch)	Dekonsentrasi Pusat	Keg. DBEP ( <i>Decentralized Basic Education Program</i> )
<b>B. Sarana Prasarana</b>		
1. Pengadaan Alat Pendidikan	Pusat	Keg. Sos. Wajar dan Pengendalian Prog
2. Subsidi Pembangunan Lab IPA	Pusat	Keg. Perluasan SMP
3. Penyediaan Peralatan Lab IPA	Dekonsentrasi	
4. Pengembangan Pusat Sumber Belajar SMP/Perpustakaan	Pusat	Keg. Perluasan SMP
<b>C. Olimpiade dan Kompetisi</b>		
1. Olimpiade Sains Nasional (OSN)	Pusat dan Dekonsentrasi	Keg. Kesiswaan
2. Olimpiade Sains Internasional (IJSO), ISPO, Singapore-Indonesia Student Leader's Adv. Camp	Pusat	Keg. Kesiswaan
3. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	Pusat dan Dekonsentrasi	Keg. Kesiswaan
4. Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	Pusat dan Dekonsentrasi	Keg. Kesiswaan
5. Lomba LPIR/Cipta Puisi dan Lagu	Pusat	Keg. Kesiswaan
6. Pelaksanaan Lomajari Tingkat Nasional	Pusat	Keg. SMPT dan Pendidikan Alternatif
7. Semiloka PP Narkoba	Dekonsentrasi	Keg. Kesiswaan
8. Seleksi Lomba-lomba tingkat provinsi dan kabupaten	Pusat	
<b>D. Pemanfaatan TIK</b>	Dekonsentrasi	
1. Subsidi TIK		
2. Multimedia Interaktif untuk 7 mapel	Dekonsentrasi	Keg. Mutu dan Pembelajaran
<b>E. Penunjang Lainnya</b>		
1. Pengelolaan BOS	Pusat	Keg. BOS
2. Workshop provinsi dalam rangka perencanaan wajar	Pusat dan Dekonsentrasi	
3. Koordinasi tingkat provinsi dan kabupaten	Pusat	Keg. Sos Wajar dan Pengendalian Prog.
4. Pemberian penghargaan Widyakrama	Pusat	Keg. Sos Wajar dan Pengendalian Prog.
5. Pembinaan SMP Berbasis Masyarakat (REDIP-G)	Pusat	Keg. Sos Wajar dan Pengendalian Prog.
6. Pembinaan SMP Terbuka	Pusat	Keg. SMPT dan Pendidikan Alternatif
7. Kegiatan Penunjang Pusat	Pusat	Seluruh kegiatan di pusat
8. Kegiatan Penunjang Perluasan dan Peningkatan Mutu Dekonsentrasi	Dekonsentrasi	
<b>III. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik</b>		
<b>A. Sistem Pengendalian Intern</b>		
1. Supervisi pelaksanaan program Dekonsentrasi	Pusat	Keg. Sos Wajar dan Pengendalian Prog.
2. Kegiatan penguatan dan pemantapan subsidi dekon	Pusat	Keg. Sos Wajar dan Pengendalian Prog.
3. Penguatan, verifikasi dan asistensi program-program Dit. PSMP	Pusat dan Dekonsentrasi	Keg. Sos Wajar dan Pengendalian Prog.
<b>B. Administrasi dan Manajemen</b>		
1. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan Dit. PSMP	Pusat	Keg. Rutin
2. Penyelenggaraan operasional rutin	Pusat	Keg. Rutin
3. Pengelolaan dekonsentrasi	Dekonsentrasi	

terpisah-pisah sebagaimana terlihat pada rumusan SK dan KD pada Stándar Isi.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, pemerintah (Depdiknas) perlu mengembangkan kegiatan pembelajaran IPA/IPS terpadu dengan konsep yang lebih jelas dan terarah sehingga sekolah dapat melaksanakan pembelajaran IPA/IPS terpadu dengan baik.

Tujuan dari kegiatan pengembangan pembelajaran IPA/IPS terpadu yang utama dirumuskan sebagai berikut: 1) mengembangkan model bahan ajar IPA/IPS terpadu, dan 2) mengembangkan model silabus dan RPP IPA/IPS terpadu melalui analisis dan sintesis SK dan KD IPA/IPS yang memungkinkan.

Sasaran kegiatan ini adalah penyusunan model Naskah Pembelajaran IPA/IPS terpadu sebanyak 5 naskah.

### 8) Bintek Pembelajaran IPA dan IPS Terpadu bagi RSBI & SSN

Sesuai dengan ketentuan pada Permen Diknas nomor 22 tahun 2006 tentang Stándar Isi, mata pelajaran IPA dan IPS untuk SMP diajarkan secara terpadu. Dengan kata lain, pembelajaran Biologi, Fisika, dan Kimia tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang terpisah-pisah. Hingga tahun pelajaran 2007/2008, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Stándar Isi dan Stándar Kompetensi Lulusan (KTSP) di sekolah, pelaksanaan pembelajaran IPA dan IPS terpadu masih menghadapi berbagai kendala yang menjadikan pelaksanaan pembelajaran IPA dan IPS terpadu kurang optimal.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, pemerintah (Depdiknas) perlu mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis pembelajaran IPA dan IPS terpadu bagi RSBI dan SSN dengan konsep yang lebih jelas dan terarah sehingga sekolah dapat melaksanakan pembelajaran IPA dan IPS terpadu dengan baik.

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogis guru IPA dan IPS terpadu

Sasaran kegiatan ini adalah para guru mata pelajaran IPA (IPA Biologi dan IPA Fisika) dan IPS (Sejarah, Ekonomi dan Geografi) dari RSBI dan SSN. Peserta masing-masing sekolah adalah 5 guru.

IPA, dan Bahasa Inggris sesuai dengan (model) standar isi dan standar kompetensi lulusan mata pelajaran matematika untuk SMP BI; soal standar dalam bahasa Inggris untuk evaluasi belajar tahap akhir mata pelajaran matematika, IPA, dan Bahasa Inggris sesuai dengan (model) standar isi dan standar kompetensi lulusan mata pelajaran matematika untuk SMP BI; soal standar dalam bahasa Inggris untuk ulangan semester mata pelajaran matematika, IPA, dan Bahasa Inggris sesuai dengan (model) standar isi dan standar kompetensi lulusan mata pelajaran matematika untuk SMP BI; bank soal standar dalam bahasa Inggris untuk ulangan kenaikan kelas mata pelajaran matematika, IPA, dan Bahasa Inggris sesuai dengan (model) standar isi dan standar kompetensi lulusan mata pelajaran matematika untuk SMP BI.

### 7) Pengembangan Materi IPA dan IPS Terpadu

Sesuai dengan ketentuan pada Permen Diknas nomor 22 tahun 2006 tentang Stándar Isi, mata pelajaran IPA dan IPS untuk SMP diajarkan secara terpadu. Dengan kata lain, pembelajaran Biologi, Fisika, dan Kimia tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang terpisah-pisah, demikian juga dengan mata pelajaran IPS yaitu. Hingga tahun pelajaran 2007/2008, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Stándar Isi dan Stándar Kompetensi Lulusan (KTSP) di sekolah, pelaksanaan pembelajaran IPA dan IPS terpadu masih menghadapi berbagai kendala yang menjadikan pelaksanaan pembelajaran IPA dan IPS terpadu kurang optimal. Di antara kendala-kendala tersebut yang utama antara lain: 1) Sebagian besar guru Fisika, Biologi, dan Kimia, Ekonomi, Geografi, Sosiologi, dan Sejarah belum siap mengajar IPA dan IPS terpadu karena memang guru-guru tersebut tidak dipersiapkan (dididik) untuk mengajar IPA dan IPS terpadu; 2) Bahan ajar IPA dan IPS terpadu masih sangat terbatas. Bahkan, yang ada – walaupun diakui sebagai bahan ajar IPA/IPS terpadu – belum sepenuhnya terpadu sebagaimana dikehendaki oleh Stándar Isi; 3) Stándar Isi sebagaimana ditetapkan melalui Permen Diknas nomor 22 tahun 2006 belum sepenuhnya mendorong terjadinya pembelajaran IPA terpadu. Hal ini antara lain disebabkan oleh kenyataan bahwa SK dan KD pada Stándar Isi IPA/IPS belum sepenuhnya mencerminkan konsep keterpaduan. Substansi Biologi, Fisika, dan Kimia (dalam IPA), substansi Sejarah, Ekonomi, Geografi, Sosiologi (dalam IPS) masih

## B. KEGIATAN

Beikut ini adalah penjabaran atau penjelasan tiap program dan kegiatan yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direktorat Pembinaan SMP untuk dilaksanakan tahun 2009. Tata urutan penjabaran ini juga disesuaikan dengan urutan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Depdiknas yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan dan skema DPR yaitu :

### 1. Perluasan dan Pemerataan Akses.

#### a. Pendanaan

##### 1) Penyediaan Beasiswa bagi Siswa Miskin jenjang SMP

Dana BOS untuk SD dan SMP yang diberikan kepada sekolah tidak mencakup kebutuhan pribadi siswa. Salah satu biaya yang harus ditanggung orangtua yang dirasakan sangat membebani orangtua siswa adalah buku teks pelajaran. Untuk itu, mulai tahun 2006, Pemerintah juga meluncurkan program BOS BUKU, untuk membantu meringankan beban orangtua siswa dalam pemenuhan kebutuhan buku teks pelajaran. Hingga akhir tahun 2007, sudah ada dua buku yang telah didanai melalui program BOS BUKU. Sementara buku-buku lainnya diharapkan dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat. Kenyataan di lapangan banyak orangtua, terutama orang tua miskin, yang masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan bagi putra-putrinya, seperti buku, seragam, dan alat tulis, biaya transportasi, dan biaya lain-lain yang tidak ditanggung oleh dana BOS dan BOS BUKU, yang untuk selanjutnya disebut sebagai biaya pribadi siswa.

Untuk itu mulai tahun 2008 dan selanjutnya, Pemerintah kembali memberikan beasiswa bagi siswa miskin untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa di SMP agar siswa dari keluarga miskin dapat terus melangsungkan pendidikannya. Maksud pemberian program Beasiswa Siswa Miskin (BSM) adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat keluarga miskin akan layanan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama.

Tujuan dari program ini antara lain: 1) Membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa selama duduk di bangku sekolah; 2) Mencegah siswa dari kemungkinan

putus sekolah akibat kesulitan ekonomi; 3) Memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada siswa untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan SMP; 4) Membantu kelancaran program sekolah.

Sasaran program beasiswa siswa miskin yang masuk dalam mekanisme Dekonsentrasi ini adalah siswa miskin dan telah dibebaskan dari segala jenis iuran sekolah pada jenjang pendidikan SMP/SMPLB/SMP Satu Atap di seluruh wilayah NKRI.

## 2) Melanjutkan Penyediaan BOS SMP

Program BOS yang awalnya dirancang untuk menghindari Drop Out akibat kenaikan BBM, ternyata juga sangat signifikan meningkatkan partisipasi anak untuk melanjutkan ke SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. Oleh karena itu pada tahun 2009 pemerintah tetap melanjutkan program BOS ini. Pengelolaan program BOS ini terdapat dua jenjang yaitu di tingkat pusat dan provinsi (dekonsentrasi).

Bila tahun 2008 pengelolaan dana BOS SD dan SMP merupakan tugas Direktorat SMP, maka pada tahun 2009 pengelolaan BOS SD terpisah dengan BOS SMP. Sedangkan di tingkat provinsi, bila pada tahun 2008 pengelolaan atau manajemen BOS merupakan suatu kegiatan tersendiri, maka pada tahun 2009 ini pengelolaan BOS SMP merupakan salah satu sub kegiatan didalam Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP. Hal ini dimaksudkan untuk mengefisienkan biaya pengelolaan atau manajemen program yang dilaksanakan di tingkat provinsi.

Unit cost BOS SMP tahun 2009 terdapat kenaikan dari tahun 2008 dan dibedakan antara kota dan kabupaten. Sehingga unit cost tersebut menjadi Rp. 575.000/siswa/tahun bagi siswa SMP di kotamadya, dan Rp. 570.000/siswa/tahun bagi siswa SMP di kabupaten.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang peningkatan kesejahteraan PNS tahun 2009, maka pada tahun 2009 seluruh SMP Negeri harus gratis untuk biaya operasional, kecuali sekolah SBI atau RSBI. Sedangkan untuk sekolah swasta agar mengefisienkan pungutan atau biaya yang dibebankan kepada orang tua siswa agar biaya sekolah dapat ditekan. Pemda kabupaten/kota diharapkan ikut mengawasi kebijakan BOS tahun

BSNP, hal tersebut meliputi: Standar Kelayakan Isi, Penyajian, Bahasa dan Grafika.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: rancangan materi dan komponen bahan ajar kontekstual SMP pada mata pelajaran TIK/Keterampilan, Seni Budaya, Penjasokes yang perlu disempurnakan sesuai Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, serta kriteria bahan ajar yang baik menurut BSNP, format dan model bahan ajar, rincian pembagian tugas penyempurnaan bahan ajar

## 6) Penyusunan Bank Soal Evaluasi Hasil Belajar MIPA Bilingual (Bahasa Inggris)

Di antara pengayaan yang digariskan dalam Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional adalah bahwa Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan mata pelajaran matematika, IPA, dan bahasa Inggris diperkaya dan/atau diperdalam serta dilaksanakan dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Pengayaan dan/atau pendalaman dan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran berimplikasi pada cakupan, kedalaman, dan penggunaan bahasa dalam evaluasi pencapaian belajar peserta didik. Cakupan dan/atau kedalaman evaluasi untuk peserta didik SMP BI akan lebih luas/dalam dibandingkan dengan peserta didik pada SMP berstandar nasional, dan soal-soal evaluasi untuk peserta didik SMP BI dirumuskan dalam bahasa Inggris.

Evaluasi pencapaian hasil belajar untuk mata pelajaran yang diperkaya dalam bahasa Inggris merupakan hal yang baru bagi hampir semua rintisan SMP BI di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, sekolah pada umumnya belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengembangkan soal-soal standar yang memenuhi SI dan SKL yang telah diperkaya/diperdalam dalam bahasa Inggris. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat memandang perlu untuk menyusun soal-soal standar untuk ulangan semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian akhir dalam bahasa Inggris. Selain sebagai model, soal-soal tersebut dipakai untuk pelaksanaan ulangan semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian akhir yang hasilnya digunakan untuk pemetaan kualitas dan pembinaan rintisan SMP BI.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyusun: Standar Kompetensi Lulusan evaluasi belajar tahap akhir mata pelajaran matematika,

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun anggaran 2009 Direktorat Pembinaan SMP bermaksud mendokumentasikan best practices pada bidang proses pembelajaran yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Best practices tersebut didokumentasikan dalam bentuk media audio-visual (film) yang disimpan dalam VCD untuk kemudian dapat digandakan dan disebarluaskan ke semua sekolah.

### Tujuan

Kegiatan ini bertujuan mendokumentasikan best practice dalam proses pembelajaran dari mapel-mapel sesuai dengan struktur kurikulum. Best practice tersebut diharapkan dapat menjadi contoh, motivator, dan inspirator sekolah-sekolah lainnya untuk melakukan praktik-praktik pembelajaran yang baik.

### 5) Pengembangan Bahan Ajar Kontekstual (TIK, Seni Budaya, Keterampilan dan Penjasorkes)

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Dit. Pembinaan SMP telah melakukan pengembangan pembelajaran kontekstual, termasuk bahan ajar dan pelatihan pembelajaran kontekstual kepada para Guru SMP. Melalui pengembangan bahan ajar kontekstual dan pelatihan tersebut diharapkan para guru dapat memahami esensi pembelajaran kontekstual, menguasai bahan ajarnya, serta mampu menyelenggarakan pembelajaran kontekstual secara efektif di sekolahnya.

Berkaitan dengan kebijakan penggunaan buku dan bahan ajar yang harus memenuhi standar atau kriteria sebagaimana ditetapkan oleh BSNP, telah dilakukan pengkajian atau penilaian internal terhadap bahan ajar CTL yang telah dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan SMP. Berdasarkan pengkajian tersebut dihasilkan masukan dan deskripsi materi serta format yang perlu digunakan untuk menyempurnakan bahan ajar sesuai kriteria BSNP. Sebagai tindak lanjutnya, dipandang perlu untuk segera melaksanakan penyempurnaan bahan ajar tersebut.

Tujuan kegiatan ini adalah menyusun rancangan pelaksanaan penyempurnaan bahan ajar kontekstual SMP mata pelajaran, Seni Budaya, TI, dan Keterampilan sesuai Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, serta kriteria bahan ajar yang ditetapkan

2009 serta memenuhi kewajibannya untuk menyediakan dana pendamping guna mendukung kebijakan ini.

### b. Sarana Prasarana

#### 1) Subsidi Pembangunan USB SMP

Dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun, terutama untuk kantong-kantong daerah yang angka partisipasi kasarnya di bawah rata-rata nasional, Direktorat Pembinaan SMP menyediakan program pembangunan USB. Program ini dilaksanakan dengan memberikan subsidi/bantuan (*block grant*) kepada panitia pembangunan sekolah dan pengelolaannya melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan program bersama ini diharapkan pembangunan sekolah menjadi lebih optimal dan masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas yang telah dibangunnya.

Sasaran program *block grant* pembangunan USB adalah kabupaten/kota yang mempunyai APK rendah dan angka absolut anak yang tidak melanjutkan tinggi, dan juga kabupaten/kota yang APKnya sudah tinggi tetapi angka absolut yang tidak melanjutkan masih tinggi. Kegiatan ini dilaksanakan di pusat.

#### 2) Subsidi Pembangunan SD-SMP Satu Atap

Dalam kerangka untuk menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pembangunan SD-SMP Satu Atap dilakukan untuk mengatasi kendala jarak geografis yang jauh antara rumah dan sekolah, antara SD-SMP. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi anak usia sekolah 7 – 15 tahun untuk termotivasi bersekolah di SD dan SMP.

Pada saat APK masih rendah, usaha peningkatan masih relatif mudah karena ada banyak pilihan atau prioritas kantong-kantong sasaran peningkatan APK baik di perkotaan maupun di pedesaan. Tetapi pada tahap akhir (seperti saat ini yang APK SMP secara nasional telah mencapai sekitar 96,18%), peningkatan APK menjadi lebih sulit karena lokasi yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat SMP terkonsentrasi di daerah terpencil, terisolir, dan terpencar-pencar. Untuk itu pemerintah perlu mencari pola penuntasan wajib belajar untuk daerah dengan ciri-ciri tersebut.

Cara yang bisa digunakan adalah dengan mendekatkan SMP dengan tempat konsentrasi anak-anak tersebut tanpa membangun unit sekolah baru, yaitu dengan mengembangkan Pendidikan Dasar Terpadu atau SD-SMP Satu Atap. Pengembangan pendidikan dasar ini menyatukan SMP ke lokasi SD dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada di SD yang telah ada.

Pada tahun 2008, program ini dilaksanakan di dua jenjang yaitu pusat dan provinsi. Di tingkat Pusat program ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Loan atau PHLN (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri), bekerja sama dengan pemerintah Australia melalui program *Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development* (AIPRD) membangun SD-SMP Satu Atap di 6 provinsi di Indonesia Bagian Timur yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Sedangkan di tingkat provinsi, program ini masuk dalam sub kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP Provinsi di luar sasaran provinsi AIBEP, sebanyak 23 provinsi. Provinsi lainnya yang tidak terdapat program ini merupakan provinsi yang sudah menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun sampai ditingkat kabupaten/kota di provinsi tersebut, yaitu provinsi DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, dan Bali.

Pada tahun 2009, program pembangunan SD-SMP Satu Atap ini hamper semuanya dilaksanakan di provinsi, kecuali provinsi yang sudah menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun sampai ditingkat kabupaten/kota di provinsi tersebut, yaitu provinsi DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Bali dan Bangka Belitung; serta provinsi yang memerlukan perencanaan khusus seperti Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

### 3) Subsidi Pembangunan RKB SMP

Salah satu program yang dikembangkan Direktorat Pembinaan SMP dalam rangka penuntasan Wajar 9 Tahun adalah dengan membangun RKB di sekolah-sekolah yang *over-capacity*, dan SMP yang daya tampungnya belum optimal. Program ini diberikan dalam bentuk subsidi imbal swadaya (*matching grant*) kepada sekolah yang bersangkutan dan pengelolaannya melibatkan partisipasi masyarakat. Sasaran program Imbal Swadaya (*matching grant*) RKB ini adalah Sekolah Menengah

Disamping SMP Terbuka, Pendidikan Keterampilan juga akan dikembangkan pada SMP Reguler yang mempunyai angka melanjutkan ke sekolah menengah rendah.

### 4) Pengembangan Materi Best Practice

#### Latar Belakang

Kebijakan pembangunan pendidikan pada tingkat SMP yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan SMP pada dasarnya meliputi pemerataan dan perluasan layanan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan, dan peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan. Kebijakan Direktorat Pembinaan SMP tersebut dituangkan dalam berbagai program yang diimplementasikan pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah untuk mewujudkan layanan pendidikan pada tingkat SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Agar program-program yang dikembangkan dapat dilaksanakan oleh sekolah dengan baik, Direktorat Pembinaan SMP telah menyusun panduan pelaksanaan semua program, menyelenggarakan sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan/workshop pelaksanaan program, melaksanakan supervisi klinis, dan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti program. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi, upaya-upaya tersebut belum secara maksimal dapat menjadikan sekolah-sekolah sasaran program dapat mengimplementasikan program-program dengan baik. Sekolah-sekolah memerlukan contoh nyata/empiris cara mengimplementasikan program dengan baik. Contoh tersebut perlu dikemas dalam bentuk buku, film dokumenter, atau format lainnya yang mudah dideseminasikan ke semua sekolah dan selanjutnya dipahami untuk ditiru/dicontoh atau bahkan dikembangkan lebih lanjut.

Pada saat ini, sejumlah sekolah telah melaksanakan berbagai praktik di sekolah yang efektif secara terus-menerus dalam jangka waktu yang relatif lama di berbagai aspek pendidikan, misalnya pembelajaran dan pemanfaatan dan/atau pengembangan sarana/media pendidikan yang menjadikan mutu layanan dan lulusan sekolah meningkat secara signifikan. Praktik-praktik yang efektif (*best practices*) tersebut perlu dideseminasikan ke sekolah-sekolah lain.

- e) Termasuk sekolah yang tergolong kategori baik di kabupaten/kota yang bersangkutan, yaitu memiliki karakteristik baik dan cukup terhadap delapan standar dalam SNP.
- f) Sekolah memiliki potensi kuat untuk berkembang,
- g) Bukan sekolah yang didukung oleh yayasan yang memiliki pendanaan yang kuat, baik dari dalam maupun luar negeri.
- h) Sekolah dengan nilai akreditasi minimal B.

Sedangkan kriteria khusus SMP Standar Nasional adalah berkait dengan pemenuhan standar nasional pendidikan, yaitu berkait dengan:

- a) Isi/kurikulum sekolah
- b) Proses pembelajaran,
- c) Pelaksanaan program terkait standar Isi/kurikulum
- d) Pelaksanaan proses pembelajaran,
- e) Ketercapaian lulusan (kompetensi lulusan).
- f) Kondisi/keadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- g) Kondisi sarana dan prasarana sekolah.
- h) Pelaksanaan model manajemen/pengelolaan.
- i) Standar pembiayaan
- j) Penilaian yang diterapkan di sekolah.

Sasaran rintisan SMP Standar Nasional (SSN) adalah SMP negeri dan swasta yang memenuhi persyaratan atau kriteria umum dan khusus yang ditetapkan sebagai SSN.

### 3) Subsidi Keterampilan SMP Terbuka dan SMP Reguler

Sebagai salah satu upaya yang ditempuh untuk meningkatkan potensi anak yang diprediksi setelah lulus SMP tidak akan melanjutkan ke pendidikan menengah, maka di kembangkan program ketrampilan.

Tahun 2009 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, menyelenggarakan program pendidikan keterampilan sebagai bagian dari sistem Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup, yang diselenggarakan di SMP Terbuka dalam bentuk subsidi keterampilan SMP Terbuka.

Pertama (SMP) negeri dan swasta. Kegiatan ini dilaksanakan di pusat.

Tujuan program subsidi imbal swadaya RKB ini adalah:

- a) Meningkatkan daya tampung dan mutu pendidikan SMP sehingga anak-anak dari seluruh lapisan masyarakat memiliki kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, termasuk anak-anak yang kurang beruntung, yang tinggal di daerah terpencil, dan daerah perkotaan yang kumuh, daerah bermasalah, serta masyarakat miskin;
- b) Memberikan rangsangan terhadap penyelenggaraan SMP guna memperkuat peran sertanya dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
- c) Mendorong terwujudnya penyelenggaraan SMP yang mandiri sehingga terwujud penyelenggaraan MBS;
- d) Mendorong anak-anak usia 13 – 15 tahun yang belum memperoleh kesempatan belajar untuk masuk sekolah sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi anak masuk sekolah, terutama di daerah yang jumlah anak tidak bersekolah SMP/MTs masih tinggi;
- e) Meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan nasional yang bermutu melalui pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka mensukseskan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun

### 4) Rehabilitasi Ruang

Dengan asumsi bahwa umur bangunan adalah 20 tahun, maka 5% dari keseluruhan gedung SMP setiap tahunnya harus direhab total. Dengan jumlah 200.000 ruang kelas SMP yang tersebar di seluruh provinsi, maka setiap tahunnya pemerintah harus merehab total sebanyak 10.000 ruang kelas. Apabila ruang-ruang yang rusak berat tersebut tidak segera diperbaiki dan akhirnya tidak dapat dipergunakan, maka daya tampung sekolah akan turun dan meningkatkan angka putus sekolah. Untuk itu usaha rehabilitasi gedung SMP/MTs yang rusak harus merupakan salah satu prioritas pemerintah sehingga siswa dapat belajar dengan baik dan mengurangi kemungkinan anak putus sekolah.

Rehabilitasi SMP dilakukan dengan pola imbal swadaya, baik dengan sekolah negeri maupun sekolah swasta untuk menggali partisipasi Pemda.

Bila pada tahun 2008 pelaksanaan kegiatan ini merupakan tugas provinsi, maka pada tahun 2009 pelaksanaan program ini menjadi tugas pusat.

## 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing

### a. Pendanaan

#### 1) SMP-RSBI

Seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20/2003 bahwa setiap kabupaten/kota harus memiliki minimal satu satuan pendidikan bertaraf internasional, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. SBI adalah sekolah nasional yang memiliki kemampuan bertaraf internasional. Jadi SBI adalah sekolah yang telah memenuhi 8 standar nasional pendidikan plus standar internasional. Delapan standar nasional yang dimaksud adalah standar isi, proses, lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, biaya, pengelolaan, dan penilaian. Standar internasional adalah standar yang berlaku secara internasional. Pada tahun 2009 Direktorat Pembinaan SMP melakukan pembinaan rintisan sekolah bertaraf internasional (SBI) 300 sekolah, dan persiapan rintisan SBI 50 sekolah.

Masing-masing SMP yang telah dipilih sebagai rintisan SBI akan didukung dana, baik dari pusat maupun daerah dan dikembangkan kemampuannya/kapasitasnya sehingga mampu menyelenggarakan SBI secara maksimal.

#### 2) SMP-SSN

Sekolah Standar Nasional merupakan sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang berarti memenuhi kriteria Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang terstandar dan menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum tentang berbagai aspek dalam sistem pendidikan nasional yang harus dipenuhi oleh

penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, yang berlaku di seluruh Indonesia. SNP tersebut mencakup standar: 1) isi, 2) proses, 3) kompetensi lulusan, 4) pendidik dan tenaga kependidikan, 5) sarana dan prasarana, 6) pengelolaan, 7) pembiayaan dan 8) standar penilaian pendidikan.

Tujuan dilaksanakannya SSN antara lain adalah:

- a) Sebagai rintisan terwujudnya SMP yang memenuhi kriteria minimal sebagaimana ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- b) Sebagai rintisan untuk menuju sekolah mandiri sesuai dengan SNP yang memenuhi kriteria Sekolah Standar Nasional yang memenuhi kriteria sekolah formal mandiri.
- c) Untuk menjadikan model SMP yang sesuai dengan SNP, sehingga dapat dijadikan rujukan bagi sekolah sekitarnya.
- d) Sebagai rintisan sekolah untuk diarahkan menuju sekolah standar nasional.
- e) Sebagai persiapan awal sekolah menuju sekolah bertaraf internasional.

Kriteria SMP Standar Nasional dapat dibedakan menjadi kriteria umum dan kriteria khusus. Adapun kriteria umum sekolah untuk dapat menjadi SMP Standar Nasional (Mandiri) adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki rata-rata UN tahun 2006/2007 minimal 6,35 dan UN tahun 2007/2008 minimal 6,75.
- b) Memiliki jumlah rombongan belajar minimal 9 dan maksimal 27, dengan asumsi setiap rombel jumlah siswa untuk kelas VII 32 siswa (sesuai Permendiknas tentang Sarana dan Prasarana).
- c) Luas lahan minimal sesuai dengan luas lahan minimal pada Permendiknas No. 24 tentang Standar Sarana dan Prasarana, berdasarkan jumlah rombel dan kriteria gedung (lantai 1, 2, dan 3), dengan asumsi pada tiga tahun ke depan tidak boleh menambah rombel untuk yang luas lahannya termasuk kriteria minimal.
- d) Tidak double shift (apabila masih double shift maksimal 30 % dengan harapan selama pembinaan selama 3 tahun harus sudah tidak double shift), dengan asumsi luas lahannya mencukupi.